

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEAGENAN
KONSIGNASI ANTARA PT GANTA USAHA TENGGALAN DENGAN
APOTEK CAMPANG RAYA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)**

Oleh

YAHYA FEBRIANA ROMADON

NPM 1421030171

Program Studi : HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

Pembimbing I : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Zikri

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439H/2018M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEAGENAN
KONSIGNASI ANTARA PT GANTA USAHA TENGGALAN DENGAN
APOTEK CAMPANG RAYA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh

YAHYA FEBRIANA ROMADON

NPM 1421030171

Program Studi : HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439H/2018M

ABSTRAK

Penjualan dengan sistem konsignasi adalah suatu jenis jual beli dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. PT. Ganta Usaha Tenggalaan ini memakai praktek keagenan dengan sistem konsignasi untuk memperluas area penjualan produknya. Dalam perkembangannya, Apotek Campang Raya telah diberdayakan untuk menyebarkan produk dari PT. Ganta Usaha Tenggalaan dengan sistem konsignasi, namun kerjasama antara PT Ganta Usaha Tenggalaan dengan Apotek Campang Raya tidak terealisasi dengan baik, adanya kecurangan-kecurangan yang timbul di antara kedua belah pihak.

Adapun Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu (1). Bagaimana sistem keagenan konsignasi yang dipraktikan antara PT Ganta Usaha Tenggalaan dengan Apotek Campang Raya Bandar Lampung dilihat dari akad syirkah? (2). Bagaimana pandangan hukum Islam kerjasama antara PT Ganta Usaha Tenggalaan dengan Apotek Campang Raya?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satunya memberikan gambaran nilai-nilai yang sesuai dengan hukum Islam sehingga keagenan konsignasi ini membawa kepada kemaslahatan bersama. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kerjasama keagenan Konsignasi yang dilakukan antara PT Ganta Usaha Tenggalaan dengan Apotek Campang Raya Bandar Lampung, dalam hal penggunaan uang hasil penjualan, telah sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak Apotek Campang Raya, bahkan mangkir dalam pembayaran barang-barang yang sudah terjual dan telah jatuh tempo. Disisi lain juga pengamanat tidak memenuhi janjinya akan adanya *fee* yang telah dijanjikan, apabila penjual barang memenuhi target penjualan, seperti yang telah disepakati dalam akad.

Dengan beberapa indikasi tersebut akhirnya terjadilah keterlambatan-keterlambatan dalam pembayaran hasil penjualan dan *fee* yang dijanjikan tidak terealisasi, sehingga menimbulkan adanya ketidakharmonisan yang timbul dari para pihak. Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan tersebut berjalan tidak berkeadilan, sehingga menimbulkan kemudharatan yang tidak dibenarkan menurut Islam, sebab melanggar ketentuan syara.

Karena dalam melakukan kerjasama dalam Islam haruslah berkeadilan, Rasulullah SAW bersabda “Tidak boleh memberikan mudharat dan tidak boleh membalas mudharat dengan kemudharatan”. Secara jelas bahwa mudharat itu wajib untuk dihilangkan, dan manusia dibebankan untuk menghilangkan kemudharatan dari dirinya dan orang lain, dan tidak boleh menghilangkan sesuatu yang terlarang dengan terlarang juga, karena itu ada kedhaliman, dan kedhaliman itu haram.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM
KEAGENAN KONSIGNASI ANTARA PT. GANTA
USAHA TENGGALAN DENGAN APOTEK CAMPANG
RAYA**

**Nama Mahasiswa : YAHYA FEBRIANA ROMADON
NPM : 1421030171
Program Studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah**

DISETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hi. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP: 197111061998032005**

**Drs. H. Zikri
NIP: 196808271994031004**

Ketua Jurusan Muamalah

**H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP: 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEAGENAN
KONSIGNASI ANTARA PT. GANTA USAHA TENGGALAN DENGAN APOTEK
CAMPANG RAYA** disusun oleh **Yahya Febriana Romadon NPM 1421030171 Jurusan
Mu'amalah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM MUNAQSAH

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Sekretaris : **Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

Penguji I : **Dr. Iskandar Syukur, M.A**

Penguji II : **Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kebahagiaan dan kebanggaan, dengan segala kerendahan hati karya ilmiah yang sederhana ini kupersembahkan untuk kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupanku :

1. Orangtuaku yang kusayangi dan kucintai Ayahanda Juliadin dan Ibunda Nurpauqoyah, yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan dan bekerja keras demi keberhasilan anak-anaknya.
2. Adik-adikku (Riska Alda Ramadan dan Rida Kartika) yang selalu menanti keberhasilanku.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan serta penyertaan skripsi ini.
4. Yang ku banggakan Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta Timur, pada tanggal 8 Februari 1995, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Juliadin dan Ibunda Sarmi. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Al-Hidayah Kampung Sawah Bandar Lampung lulus pada tahun 2001.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Petang Cakung Jakarta Timur pindah sekolah pada tahun 2004.
3. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tanjung Agung Bandar Lampung, lulus pada tahun 2007
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2010
5. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013.
6. Untuk mencapai cita-cita dan ingin menggapai gelar sarjana penulis masuk kuliah di UIN Raden Intan Lampung, dan masuk pada jurusan muamalah kelas A pada angkatan 2014.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Dia, yang berkuasa diseluruh alam semesta.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan keruniannya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Keagenan Konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya”*, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang tersedia tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. H.A Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H. dan Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua dan sekretaris program studi Muamalah atas segala arahan dan motivasinya.
4. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Drs. H. Zikri, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis menduduki bangku kuliah hingga selesai.
6. Orangtua tercinta Ayahanda Juliadin dan Ibunda Nurpauqoyah yang telah mengorbankan seluruhnya baik materil, waktu, tenaga, fikiran, dan doanya sehingga mampu menyelesaikan kuliah gelar sarjana di UIN Raden Intan Lampung.
7. Sahabat-sahabat Karibku, dan yang lain-lain yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu setia menemani dan membantuku

8. Teruntuk Abangku Muhammad Saefudin, terimakasih atas segala pengorbanannya untukku, yang tak pernah lelah menemani dan mensupportku.
9. Sahabat-sahabat tercinta Angkatan 2014 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, terutama MU A “terimakasih atas doa dan motivasi kalian semua”.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya, ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 25 November 2017

Penulis,

Yahya Febriana Romadon

NPM: 1421030171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perserikatan / Perjanjian)	16
1. Pengertian Akad	16
2. Dasar Hukum Akad.....	17
3. Asas-asas Akad	19
4. Rukun dan Syarat Akad	21
5. Macam-macam Akad	25
6. Berakhirnya Akad	32
B. Akad Syirkah.....	34
1. Pengertian Syirkah	34
2. Dasar Hukum Syirkah	37

3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	45
4. Macam-macam Syirkah	46
5. Berakhirnya Syirkah.....	55
C. Sistem Konsignasi.....	56
1. Pengertian Konsignasi.....	56
2. Pihak-pihak Konsignasi	59
3. Sistem Operasi Penjualan Konsignasi.....	59
4. Hak dan Kewajiban dari Komisioner	60

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Deskripsi singkat Obyek Penelitian	63
1. Profil Apotek Campang Raya	63
2. Pengelolaan Apotek Campang Raya Kel. Campang Raya Kec.Sukabumi	66
3. Pengelolaan Barang.....	69
4. Pengelolaan Administrasi	73
B. Pelaksanaan Praktik Keagenan Konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya	73
1. Kesepakatan keagenan konsignasi	74
2. Cara Pemesanan Barang.....	75
3. Surat Perjanjian Kerjasama	77
4. Modal, Keuntungan, dan Kerugian	79
5. Teknis pembayaran barang sistem konsignasi	85

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Keagenan Konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya	87
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Keagenan Konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak terjadi salah pengertian dan penafsiran, maka adanya perlu menjelaskan arti kata-kata dan memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Keagenan Konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggara dengan Apotek Campang Raya”. Dalam penegasan judul ini akan membahas pengertian beberapa kata yang dianggap penting agar bahasan ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.¹
2. Keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merk (principal) dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan atau pembuatan manufaktur serta penjualan atau distribusi barang modal atau produk industri tertentu.²

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1999), h.17.

² Hateka Ogenk, *Keagenan dan Distribusi* (Jakarta: Lapindo, 2011), h.70

a. Agen atau *agent* (bahasa inggris) adalah perusahaan nasional yang menjalankan keagenan.

Contoh: Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi dengan konsumen maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal ke konsumen.

b. Jasa keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan produsen di satu pihak dan konsumen di lain pihak.³

3. Konsignasi adalah syirkah yaitu prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan bersama.⁴

Contoh Penjualan konsignasi dalam pengertian sehari-hari dikenal dengan sebutan penjualan dengan cara penitipan barang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, bahwa maksud judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Keagenan Konsignasi yang dilakukan PT Ganta Usaha Tenggara dengan Apotek Campang Raya Bandarlampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

³ *Ibid.*

⁴ Gemala dewi, Wirnyaningsih, Yeni salma barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), h. 116.

1. Alasan Objektif

Mengingat perkembangan semakin maju dan modern, maka persoalan muamalah pun berkembang sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada era sekarang ini, lebih spesifiknya pada para agen dengan objek nya barang-barang konsignasi yang menggunakan sistem keagenan.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek Bahasan, a) Judul ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, b) Bahan dan Literturnya tersedia, c) Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama mungkin untuk dapat terselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam jual beli konsignasi adalah syirkah yaitu prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih keuntungan bersama. Kalau diperhatikan, seluruh sistem syirkah dalam Islam didasarkan pada sistem keadilan. Ketidakberpindahan hak milik dalam konsignasi yang mengakibatkan biaya operasional dan uang penjual menjadi kewajiban dan hak dari pemilik, sedangkan agen akan menerima *fee* dari transaksi penjualan barang yang laku. Akibat lain yang timbul dalam Penyimpangan praktik dari sistem konsignasi antara lain :

1. Pemilik barang tidak menentukan harga jual produk sedangkan dia mempunyai hak mutlak dilihat dari hak kepemilikan barang tersebut sehingga terjadi perbedaan harga jual antar agen.

2. Agen sebagai penerima barang membiayai operasional sendiri.
3. Agen menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi dan terlambat bahkan mangkir dari pemenuhan kewajiban kepada pemilik barang.

Dengan beberapa indikasi tersebut akhirnya terjadi perbedaan harga jual barang konsignasi di pasar dan menimbulkan adanya ketidakharmonisan yang timbul dari para agen sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Berdasarkan praktek Konsignasi yang terjadi antara Apotek Campang Raya Bandarlampung dengan PT. Ganta Usaha Tenggalan, Dalam hal biaya operasional yang mana dalam jual beli ditanggung oleh penjual, dan penggunaan hasil penjualan tidak ada satu dalil pendapat ulama yang dapat membenarkan hal tersebut. Begitu pula mangkir dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar sesuai tempo dan perjanjian awal kepada pemilik barang.

Islam sebagai agama yang mempunyai peran yang sangat vital terhadap perilaku umat muslim dalam berbagai bidang baik itu tauhid, ibadah maupun muamalat. Pada hakikatnya tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menciptakan keadilan tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada, dengan demikian syariat Islam perlu ditafsirkan ulang agar tetap eksis di ruang publik pada era kekinian.⁵

Prinsip ekonomi syariah tentunya harus disandarkan kepada Landasan Islam, juga keberadaan hubungan manusia dengan manusia tidak terlepas dari tuntutan yang bersumber dari Al-Quran dan sumber hukum Islam lainnya. Oleh

⁵ Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah kritik relasi-kuasa Khalil 'Abd al-Karim* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), h.10.

karena itu secara kodrati manusia sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk saling tolong menolong.⁶ Islam sebagai agama yang ramah telah mengajarkan bahwa berbuat baik terhadap orang menjadi sebuah keharusan untuk menjadi perilaku utama seorang muslim. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah :
2⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”

Pemasaran produk yang dilakukan seperti layaknya proses keagenan dengan sistem pembayaran konsignasi. Penjualan dengan sistem konsignasi adalah suatu jenis jual beli dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. Selama ini prinsip dasar yang dikembangkan dalam jual beli Konsignasi adalah syirkah yaitu prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan bersama.⁸ Prinsip ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong) dan *ukhuwah* (persaudaraan). *Asy-Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.⁹ Kepemilikan atas hasil penjualan

⁶ Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 5.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 5, (Penerbit Diponegoro: Bandung, 2005), h. 85.

⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h.116.

⁹ *Ibid.*, h. 115.

diaplikasikan dengan penetapan harga dan komisi yang pasti bagi setiap agen. Agen sebagai penerima amanat mempunyai kewajiban untuk membuat jurnal laporan terpisah atau tak terpisah serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut.

Dalam hukum muamalat sendiri belum dikenal sistem konsignasi atau titip jual ini, namun ada beberapa karakter yang mirip akad yang disebutkan dalam beberapa literatur fiqh Islam seseorang akan mendapatkan komisi atas pekerjaan yang dikerjakan dan biaya yang timbul dari pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pemberi pekerjaan, seseorang memberikan amanat kepada orang lain untuk menggantikannya dalam melakukan suatu pekerjaan dan apabila pekerjaan tersebut telah selesai, penerima amanat boleh mendapatkan komisi dari pekerjaannya. Adanya Agen dalam menjual barang dagangan ini menggunakan biaya operasional yang berasal dari kantong mereka sendiri sehingga beban tersebut menjadi penghalang keberlangsungan keagenan. Akibat lain yang timbul adalah mangkirnya beberapa agen untuk memenuhi pembayaran hasil dari barang yang telah terjual kepada pemilik perusahaan dan menggunakan hasil tersebut tanpa seizin dari pihak yang menyerahkan barang (consignor).

Keagenan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis dan dengan pembayaran upah atau komisi.¹⁰ Dalam kasus yang telah dipaparkan di atas telah

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 42.

memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penyimpangan praktik dari teori yang seharusnya.

Pembahasan sistem Keagenan Konsignasi ini sangat menarik untuk dikaji dikarenakan sudah banyak yang merasa dibebankan dikalangan para pihak agen yang melakukan kerjasama dengan sistem Konsignasi tersebut. Konsignasi mengalami perkembangan dengan banyaknya penemuan dilapangan bahwa sistem Konsignasi pun bisa menimbulkan terjadi penipuan. Karena barang-barang yang dititipkan terkadang jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam faktur pesanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk lebih sistematisnya penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem Keagenan Konsignasi yang di Praktikan antara PT. Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang sistem keagenan konsignasi yang dipraktikan antara PT. Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang sistem Keagenan Konsignasi yang di Praktikan antara Apotik Campang Raya dengan PT. Ganta Usaha Tenggalan dilihat dari akad Syirkah.
- b. Untuk mengetahui tentang Pandangan Hukum Islam kerjasama antara Apotek Campang Raya dengan PT. Ganta Usaha Tenggalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai akad Konsignasi dalam Hukum Islam dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran keIslaman pada umumnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Kegunaan praktis, bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ruang lingkup Fakultas Syariah dan masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena dalam praktik sistem keagenan dan hal-hal yang terjadi

dalam proses keagenan tersebut mengenai perkongsian yaitu bagi hasil, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan pada akhirnya memberikan analisa yang khusus, tajam dan tepat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*)¹¹ dimana objek penelitian adalah praktik sistem keagenan konsignasi di Apotik Campang Raya milik Ibu Resilia dan PT.Ganta Usaha Tenggala. Ide penting penelitian ini adalah penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati ataupun mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.¹²

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian Kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum¹³ dengan menjelaskan praktik sistem keagenan dan hal-hal yang terjadi dalam proses keagenan tersebut kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan pada akhirnya memberikan analisa

¹¹ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), h. 5.

¹² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), h. 26.

¹³ Sugiono, *metode deskriptif analitis* (Jakarta: Pustaka, 2009), h. 29.

yang tajam dan tepat dari sisi hukum Islam tentang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan dari sistem konsignasi yang terkait tentang masalah perkongsian, mekanisme pemindahan tanggung jawab antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian antara pihak pertama yang disebut consignor yaitu pihak yang menyerahkan (menitipkan) barang dagangan atas dasar konsignasi dengan pihak kedua yang disebut consignee yaitu pihak yang menerima titipan barang dagangan untuk dijualkan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer¹⁴

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pihak consignee yaitu pihak yang menerima titipan barang di Apotek Campang Raya yang mana barang tersebut akan dijualkan.

b. Data Sekunder¹⁵

Data Sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang

¹⁴ Rizky Ahmad, *Penjualan Konsignasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 131.

¹⁵ *Ibid.*, h. 5.

diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa orang, benda atau yang dapat memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian.¹⁶ Semua pihak dari PT. Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya yaitu ada 15 orang, dalam melakukan kegiatan tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil suatu populasi dan diteliti secara rinci.¹⁷ Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100 orang, maka populasi diambil semua, yaitu sampel yang di ambil pada PT Ganta Usaha Tenggalan adalah 4 orang dan dari Apotek Campang Raya yaitu 3 orang. Maka sampel dalam penelitian ini adalah penelitian populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sample dengan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta Ilmu, 2002), h. 108.

¹⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

pertimbangan tertentu merupakan teknik nonprobability sampling yang memilih orang-orang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara¹⁹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti. Macam-macam wawancara:²⁰ 1) Wawancara Tidak Terstruktur atau Tidak Terpimpin 2) Wawancara Terstruktur atau Wawancara Terpimpin 3) Focused atau semi structured interviews atau Wawancara Bebas Terpimpin 4) Wawancara Pribadi 5) Wawancara Kelompok.

Wawancara yang akan dimaksud adalah wawancara bebas terpimpin²¹ yaitu melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait secara bebas namun tetap dalam koridor pertanyaan yang fokus pada sistem keagenan konsignasi, kemudian mengumpulkan data dari hasil wawancara yang dilakukan di Apotik Campang Raya dan PT. Ganta Usaha Tenggara, total orang yang diwawancarai sebanyak 7 orang, 3 orang dari pihak Apotek

¹⁸ *Ibid.*, h. 175.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 6.

²⁰ Sugiono, *Op.Cit.*, h.10.

²¹ Roni Hanjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h.72.

Campang Raya yaitu Apoteker, Pemilik Sarana serta karyawan. dan 4 orang dari pihak PT. Ganta Usaha Tenggalan yaitu Direktur Utama, Apoteker, Kolektor dan Sales. Teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan, menyusun, dan mengelola data-data yang didapatkan dari PT Ganta Usaha Tenggalan dan Apotik Campang Raya, berupa surat perjanjian, daftar harga barang, laporan keuangan, catatan pembelian, dan lain sebagainya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Sistem Keagenan Konsignasi dalam Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis.²² Data Kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.²³ Analisis ini untuk mengetahui Akad dalam sistem Keagenan Konsignasi, karena dalam praktik sistem keagenan dan hal-hal yang terjadi dalam proses keagenan tersebut mengenai perkongsian yaitu bagi hasil, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan pada akhirnya memberikan analisa yang khusus, tajam dan tepat. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai Sistem Keagenan Konsignasi.

Dapat kemudian diambil menggunakan analisa Induktif seperti yang sudah dipaparkan. Metode Induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁴ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem akad Konsignasi, dan mekanisme Keagenan yang ditinjau dari Hukum Islam. Hasil Analisisnya dituangkan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. 7, 1996), h. 81.

²³ Muhamad, *Op.Cit.*, h. 99.

²⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 181.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad (Perikatan / Perjanjian)

1. Pengertian Akad

Secara bahasa kata akad berasal dari kata al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (al-ittifaq), menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).¹ Sedangkan secara istilah, akad di definisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syarat dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Definisi-definisi tersebut mengisaratkan bahwa, pertama, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak, ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Adapun maksud diadakanya ijab dan kabul, untuk menunjukkan adanya suka rela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dan dapat kita simpulkan bersama bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan sukarela. Dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010) h. 68.

menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Disinilah pentingnya batasan-batasan yang menjamin tidak terlangarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad adalah sebagai berikut:²

a. Al-Qur'an

1) Allah berfirman Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَّا تَعْمُوا إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah: 1).³

2) Allah berfirman Surah Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 144.

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), h. 156.

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (QS. Al-Isra: 34).⁴

3) Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

⁴ Ibid., h. 429.

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

3. Asas-asas Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:⁶

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak didasarkan firman Allah dalam Al Quran, yakni: (QS. Al Maidah : 1)

⁵ *Ibid.*, h. 70.

⁶ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h. 83.

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Kebebasan berkontrak pada ayat ini disebutkan dengan kata “akad-akad” atau dalam teks aslinya adalah al-‘uqud, yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas- batasnya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil. Sesuai firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa: 29)⁷

b. Asas perjanjian itu mengikat

Asas perjanjian itu mengikat dalam Al Qur’an memerintahkan memenuhi perjanjian seperti berikut ini :

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan

⁷ Ibid., h. 122.

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya” (QS. Al Isra : 34)⁸

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme juga didasarkan surat An-Nisaa’ ayat 29 yang telah dikutip di atas yakni atas dasar kesepakatan bersama.

d. Asas ibadah

Asas ibadah merupakan asas yang berlaku umum dalam seluruh muamalat selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini didasarkan kaidah Fiqh yakni hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

e. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi asas yang menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima

f. Asas kejujuran (amanah)

Asas kejujuran dan amanah, dalam bermuamalah menekankan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.⁹

4. Rukun dan Syarat akad

Agar suatu akad dipandang terjadi atau sah harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Sedangkan rukun adalah unsur yang mutlak dan harus

⁸ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Op.Cit.*, h. 429.

⁹ Mardani. *Op.Cit.*,h. 149.

ada dalam sesuatu hal (akad), peristiwa atau tindakan. Jumhur Ulama mempunyai beberapa pendapat mengenai hal tersebut, yaitu:¹⁰

- a. Al-Aqidain (pihak-pihak yang berakad)
- b. Obyek akad
- c. Sighat al-Aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- d. Tujuan akad

Pendapat tersebut berbeda dengan jumhur Ulama' Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa rukun akad hanya ada satu sighatu al-Aqd. Menurut-nya yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur yang pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun pihak dan obyek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan obyek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan obyek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan obyek akad merupakan syarat, bukan rukun. Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan dapat mengikat antar pihak. Adapun syarat-syarat nya meliputi:

- 1) Syarat terbentuknya akad: dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama al-syuruth al-in'iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus di penuhi oleh rukun-rukun akad ialah:¹¹

¹⁰ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012), h. 42

- a) Pihak yang berakad (aqidain), disyaratkan tamyiz dan berbilang atau terucap.
 - b) Shighat akad (pernyataan kehendak): adanya kesesuaian antara ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - c) Obyek akad: dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat di transaksikan (meliputi benda yang bernilai dan dimiliki).
 - d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'
- 2) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in-iqad tersebut dipenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang syah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:
- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap fasid.
 - b) Penyerahan obyek tidak menimbulkan madlarat.
 - c) Bebas dari gharar, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - d) Bebas dari riba.

¹¹ Sohari Saharani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 50.

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan syah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut meskipun rukun dan syarat iniqad sudah terpenuhi, akad tidak syah dan disebut akad fasid. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahanya.

- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum; adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah:¹²

- a) Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas obyek akad.
- b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan. Artinya sudah baliqh atau berakal.

- 4) Syarat mengikat yaitu sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang telah dijelaskan.

Sebelum membahas jauh saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang shighat. Dari segi pengertian shighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Shighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan

¹² *Ibid.*,

kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

5. Macam-macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar adapun pengelompokan macam-macam akad, antara lain:¹³

1. Akad menurut tujuannya:

- a. Akad Tabarru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Atau dalam redaksi lain akad Tabarru (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad.
- b. Akad Tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad Tijari (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Istishna' dan Ijarah Muntahiyah bittamlik serta mudharabah dan Musyaraqah.

¹³ *Ibid.*, h. 47

2. Akad menurut keabsahannya:

- a. Akad Sahih (Valid Contract) yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- b. Akad Fasid (Voidable Contract) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah Mauquf (terhenti dan tertahan untuk sementara).
- c. Akad Bathal (Void Contract) yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harta/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.¹⁴

3. Akad menurut namanya:

- a. Akad bernama (al-u'qud al-musamma)

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad yang lain. Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah akad bernama. Salah

¹⁴ Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI, h.48

satu contoh menurut al-Kasani (w 587/1190) akad bernama meliputi sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sewa menyewah (al-ijarah)
- 2) Pemesanan (al-istisnha)
- 3) Jual beli (al-bai')
- 4) Penanggungan (al-kafalah)
- 5) Pemindaan utang (al-hiwalah)
- 6) Pemberian kuasa (al-wakalah)
- 7) Perdamaian (ash-shulh)
- 8) Persekutuan (asy-syirkah)
- 9) Bagi hasil (al-mudharabah)
- 10) Hibah (al-hibah)
- 11) Gadai (ar-rahn)
- 12) Pengarapan tanah (al-muzaraah)
- 13) Pemeliharaan tanaman (al-mu'amalah/al-musaqah)
- 14) Penitipan (al-wadi'ah)
- 15) Pinjam pakai (al-'ariyah)
- 16) Pembagian (al-qismah)
- 17) Wasiat-wasiat (al-washaya)
- 18) Perutangan (al-qardh)

¹⁵ *Ibid.*

b. Akad tidak bernama (al-‘uqud gair al-musamma)

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian, penerbitan, periklanan, dan sebagainya.

4. Akad menurut kedudukannya:

- a. Akad Pokok (al-‘aqd al-ashli) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Seperti: akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
- b. Akad asesoir (a-‘aqd at-tabi’) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Seperti: penanggungan (al-kafalah) dan akad gadai (ar-rahn).¹⁶

5. Akad dari segi unsur tempo di dalam akad:

- a. Akad bertempo (al-‘aqd az-zamani) adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Seperti: akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad simpan pakai, dan sebagainya.
- b. Akad tidak bertempo (al-‘aqd al-fauri) adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya,

¹⁶ *Ibid.*

dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut.¹⁷

6. Akad dari segi formalitasnya:

a. Akad konsensual (al-‘aqd ar-radha’i)

Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Yang termasuk akad konsensual seperti jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang.

b. Akad formalitas (al-‘aqd asy-syakli)

Akad formalitas adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Misalnya adalah akad di luar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu akad nikah dimana diantara formalitas yang disyariatkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.

c. Akad riil (al-‘aqd al-‘aini)

Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori akad jenis ini, yaitu hibah, pinkam pakai, penitipan, kredit (utang), dan akad gadai. Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah hukum Islam yang menyatakan ”Tabaru’

¹⁷ *Ibid.*

(donasi) baru terjadi dengan pelaksanaan riil” (la yatimmu at-tabarru’ illa bi qabdh)¹⁸

7. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara’:

- a. Akad masyru’ adalah akad yang dibenarkan oleh syara’ untuk dibuat dan tidak dilarang untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa menyewa, mudharabah, dan sebagainya.
- b. Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara’ untuk dibuat seperti akad jual beli janin atau akad yang bertentangan dengan ahlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan.¹⁹

8. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya:

- a. Akad mengikat (al-‘aqd al-lazim) adalah akad dimana apabila semua rukun dan syaratnya telah terlaksana maka akad tersebut akan mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akan ini dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu: Pertama, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Kedua, akad mengikat satu pihak, yaitu akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkan tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad kafalah (penanggungan) dan akad gadai (ar-rahn).

¹⁸ *Ibid.*h. 49

¹⁹ *Ibid.*

- b. Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad ini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di-faskh), seperti akad Wakalah(pemberi kuasa), syirkah (persekutuan) dan sebagainya. (2) akad yang tidak mengikat karena didalamnya terdapat khiyar bagi para pihak.²⁰

9. Akad menurut dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan:

- a. Akad Nafiz adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut tersebut.
- c. Akad Mauquf adalah kebalikan dari akad nafiz, yaitu akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, tetapi masih tergantung (mauquf) kepada adanya retifikasi (ijasah) dari pihak berkepentingan.

10. Akad menurut tanggungan:

- a. ‘Aqd adh-dhaman adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
- b. ‘Aqd al-‘amanah adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah dari tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut,

²⁰ *Ibid.*, h. 50.

kecuali kalau ada unsur kesegajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, akad pinjaman, perwakilan (pemberi kuasa).²¹

6. Berakhirnya Akad²²

a. Berakhirnya akad karena *fasakh* (pembatalan), pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *'iarah* (pinjaman) dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian yang umum. pembatalan dalam akad *ghair lazimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik akadnya dilakukan oleh dua pihak, maupun satu pihak. adapun pembatalan (*fasakh*) dalam akad-akad *lazimah* terdapat beberapa bentuk :

- 1). Fasakh karena akadnya rusak
- 2). Fasakh (batal) karena khiyar
- 3). Fasakh (batal) karena iqalah
- 4). Fasakh (batal) karena tidak bisa dilaksanakan
- 5). Fasakh (batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad atau karena tujuan akad telah terwujud.

b. Berakhirnya akad karena kematian, akad bisa fasakh (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. diantara akad yang

²¹ *Ibid.*

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 70

berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah sebagai berikut :²³

- 1). Ijarah (sewa-menyewa), berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, meskipun akad ini termasuk akad yang lazim (mengikat) yang dilakukan oleh dua pihak. alasan mereka adalah bahwa orang yang menyewa memiliki manfaat sejak terjadinya akad dengan sedikit demi sedikit. maka manfaat yang tersisa setelah meninggalnya salah satu pihak bukan miliknya lagi, sehingga dengan demikian akad sudah berakhir dan tidak boleh dilanjutkan lagi.
 - 2). Kafalah (jaminan), kafalah ada dua macam, yaitu kafalah (jaminan) terhadap harta dan kafalah (jaminan) terhadap jiwa. dari kedua jenis kifalah tersebut, kafalah bin nafs dapat batal karena mninggalnya ashil atau meninggalnya penjamin (*kafil*).
 - 3). syirkah dan wakalah termasuk akad *ghair lazim* yang dilakukan oleh dua pihak. kedua akad tersebut berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
 - 4). Muzara'ah dan musaqah, apabila pemilik lahan meninggal sebelum tanaman matang untuk di panen maka tanaman tetap pada penggarapnya sampai setelah dipanen.
- c. Berakhirnya Akad karena tidak ada izin dalam akad mauquf, akad yang mauquf (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya.

²³ *Ibid.*

B. Akad Syirkah

1. Pengertian Syirkah (Kerja Sama).

Syirkah secara bahasa adalah masdar dari شارك – شارك – شارك yaitu شركة – شركا yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Kata ini juga berarti bagian yang bersyariat. Syirkah menurut bahasa berarti Al-Ikhtilath yang artinya adalah campur atau percampuran²⁴ dan Persekutuan²⁵ dua harta menjadi satu. Demikian dinyatakan oleh Taqiyudin, yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Syirkah menurut Imam Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.²⁶ Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berpendapat, antara lain:

Menurut Ulama Hanafiah, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya : “Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.²⁷

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

²⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 79.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op.Cit.*, h. 127.

²⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Tanpa tempat: Ictisar baru Van Hoeve, 1996), h. 1711.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Loc.Cit.*

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ الْإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya : “Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.²⁸

Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme dimana pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian dimana perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat, jika diperhatikan bahwa tujuannya untuk mencapai kepuasan materialistis masyarakat secara keseluruhannya. Namun dalam hal modal Imam Syafi’i mengatakan bahwa serikat dagang itu baru sah apabila kedua belah pihak sudah mencampurkan hartanya untuk dijadikan modal, adapun yang sesuai dalam pandangan Imam Syafi’i adalah *Syirkah Inan*.²⁹

Sedangkan Abdurrahman I. Doi, seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa *syirkah* (*partnership*) adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-masing peserta.³⁰

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عُقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ

²⁸ Muhammad Syarbini Al-Katib, *al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, h. 41

²⁹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Mansurah : Darul Wafa', 2001), Juz IV, h. 487.

³⁰ Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah : The Islamic Law*, A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur, 1990, h. 365.

Artinya : “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.³¹

Menurut Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.³² Sehingga dapat di pahami bahwa yang di maksud syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugikannya ditanggung bersama. Yang paling ditekankan dalam syirkah yaitu asas kejujuran karena hal ini berhubungan dengan bisnis suatu kerjasama dalam usaha tertentu, hal ini juga telah dicontohkan oleh nabi dengan hadistnya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (رواه أبو داود).

Artinya : "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah : Aku adalah orang ke tiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan" (HR : Abu Daud).³³

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Loc.Cit.*, h. 127.

³² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986). h.106.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op.Cit.*, h. 128.

Hadist ini di sebutkan di dalam kitab hadist sebanyak empat kali yaitu di dalam kitab sunnah Abi Daud (3383), Al-Hakim (52) jus 2, Ad-Daruqutni (303), dan Al-Baihaqi (78) jus 6, tetapi hanya mengambil di dalam kitab sunnah Abi Daud.

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa serikat itu adalah kerja sama atau perseroan dalam hal bisnis baik antara dua belah pihak maupun lebih dari dua orang اَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ gambaran yang diberikan oleh hadist diatas

adalah implikasi yang harus diutamakan dalam syirkah adalah kejujuran, maka tidak boleh ada pengkhianatan antara kedua belah pihak.

Pengkhianatan yang dilakukan dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, jika ada indikasi-indikasi atau telah terjadinya pengkhianatan maka pihak yang berserikat dapat keluar dari perserikatas tersebut.

Dalam melaksanakan perjanjian yang merupakan perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan iktikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.³⁴ Tidak boleh adanya pengkhianatan diantara kedua belah pihak itu.

2. Dasar Hukum Syirkah

Dasar hukum syirkah antara lain sebagaimana yang di syari'atkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Ijma'.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 307

a. Al-Qur'an

1) Allah SWT. berfirman dalam Surah Shad ayat 24 yang berbunyi:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya : "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini..." (Q.S. Shaad : 24)³⁵

Asbabun nuzul ayat diatas adalah, ketika Nabi Daud terkejut kedatangan dua orang tamu yang memanjat pagar untuk datang ke rumahnya. Dan ternyata kedua orang tamu tersebut adalah dua orang yang berperkara dimana salah satu diantara mereka berbuat zalim pada lainnya. Dan mereka meminta Nabi Daud untuk memberikan keputusan yang adil atas perkara tersebut. Dimana perkaranya adalah ketika salah satu diantara mereka mempunyai 99 ekor kambing, dan salah satu lainnya hanya memiliki 1 ekor kambing. Namun, pemilik 99 ekor kambing menginginkan kawannya itu untuk menyerahkan kambingnya sehingga lengkaplah 100 kambing dimilikinya. Terjadi perdebatan dan pemilik 1 ekor kambing kalah dalam perdebatan. Menurut Nabi Daud pemilik 99 ekor kambing telah berbuat zalim kepada pemilik 1 ekor kambing karena meminta kambingnya untuk ditambahkan untuknya. Kemudian Nabi Daud mengatakan apabila dalam

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit.*, h.735.

perserikatan ada orang yang berbuat zalim kepada yang lain, kecuali dia memiliki iman dan amal saleh.

Maksud dari ayat ini adalah agar orang bersekutu tidak boleh saling menzalimi. Karena orang yang berbuat kebajikan dan beriman tidak mungkin berbuat zalim dalam bersekutu.

2) Allah SWT. Berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلْثِ

Artinya : "...mereka bersekutu dalam yang sepertiga" (Q.S. An-nisa' : 12)³⁶

Maksudnya ayat ini adalah ayat syirkah dimana kita fokus pada kata "berserikat". Itu artinya sudah jelas jika dalam Al-Qur'an sudah dianjurkan untuk berserikat atas bersyirkah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan Syariah.

Secara garis besar, kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa:12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah As-Shad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).³⁷

³⁶ *Ibid.*, h. 117.

³⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 91.

3) Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maaidah : 2)³⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna atau menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa semua kegiatan muamalah itu hukumnya mubah atau dibolehkan, dan berserah diri kepada Allah apa yang kamu kerjakan, dan saling tolong-menolong antar sesama, sehingga tidak terjadi saling mendzalimi antara yang satu dengan yang lain, melakukan kemaksiatan, seperti dengan nyanyian, alat musik, dan semua seruan yang mengajak kepada maksiat. Hal ini mencakup semua maksiat

³⁸ Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz, Syekh Shalih, dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.320.

yang terkait dengan harta dan anak, seperti enggan membayar zakat, harta riba, mengambil harta tanpa haknya, dan harta hasil ghasb (rampasan).³⁹

b. Hadis

1) Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ اللَّهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا } (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, “Aku menjadi yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia telah berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya.” Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim.⁴⁰

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama orang yang berserikat dengan memberi pertolongan dan limpahan rezeki dalam perniagaan mereka. Apabila diantara mereka telah melakukan khianat kepada yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya. Syirkah boleh dilakukan sesama muslim

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 520.

atau sesama kafir Dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan kafir Dzimmi. Sehingga orang Islam bisa melakukan perseroan dengan nasrani, majusi dan kafir Dzimmi lainnya.

Hukum melakukan perseroan dengan orang Yahudi, Nasrani dan kafir Dzimmi adalah mubah. Hanya saja, orang non muslim tersebut tidak boleh menjual minuman keras atau barang haram lainnya sementara mereka melakukan perseroan dengan orang muslim. Sedangkan barang haram yang diperdagangkan sebelum mereka melakukan perseroan dengan orang Islam, laba penjualanya yang dipergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam tetap boleh dipergunakan.

2) Hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al-Hakim:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِ لَّا تُدَارِيْنِي وَلَا تُمَارِيْنِي (رواه أبو داود
والنسائي والحاكم و يصححه)

Artinya: “Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku” (H.R. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al-Hakim, dan dia menshahihkannya).⁴¹

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam menjalin kerja sama (*syirkah*) sesama mitra tidak boleh saling mengkhianati. Dalam hadis ini disebutkan

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Muktabah ma'rif, 273H), h. 232.

mitra yang baik adalah mitra yang tidak saling mengkhianati dan tidak membantah.

3) Hadis Nabi SAW, dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ
فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ... (رواه التَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, “saya, Ammar dan Sa'ad berserikat dalam harta yang kami peroleh ketika perang badar...”

(H.R. Nasa'i).⁴²

Hadis ini pun menjadi dasar hukum syirkah, karena terdapat kata berserikat yang menandakan bahwa hadis ini juga menunjukkan kebolehan atau kemubahan dalam berserikat (*syirkah*).

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ
فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ أَصَابَتْهُ
السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ
مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم).

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian

⁴² Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Bin Ahamad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rasyid Al-Qurthabi Al-Andalusi, *Bidayatul Mujaahid Wa Nahayatul Muqtashid*, Juz 1-2, (Semarang: Thaha Putra), h. 192

makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami”. (HR. Muslim).⁴³

c. *Ijma'*

Sedangkan landasan *ijma'* nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Muznir. Sekalipun pada pembagian-pembagian jenis *syirkah* terdapat perbedaan pendapat, namun umumnya mereka sepakat bahwa *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan.⁴⁴

Jadi, dasar hukum *syirkah* yaitu al-Qur'an, al-hadis, dan *ijma'* ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum *syirkah* sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip Islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memilki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

⁴³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h. 522.

⁴⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Loc.Cit.*, h. 91.

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama' Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua macam, yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan Kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan Kabul sering disebut dengan serah terima.⁴⁵ Sebab ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah.

Di dalam kitab bidayatul mujtahid dijelaskan bahwa rukun syirkah ialah:

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta.
- b. Mengetahui kadar harta yang akan di serikatkan.
- c. Mengetahui kadar harta dari dua orang yang berserikat.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah. Secara garis besar syarat dari syirkah ialah *harta* dan *aqad*. Sedangkan menurut Hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu:⁴⁶

1). Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini ada dua syarat, yaitu:

- (a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan
- (b) yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

2). Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu;

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Loc.Cit.*, h. 128

⁴⁶ *Ibid.*

- (a) bahwa modal yang dijadikan objek syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti dollar, riyal dan rupiah,
 - (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3). Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan
- (a) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama,
 - (b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah
 - (c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4). Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd).⁴⁷

4. Macam-macam Syirkah

Ranah-ranah kajian syirkah sangatlah luas, apa lagi pada zaman sekarang ini banyak para pemilik modal untuk melakukan syirkah dalam istilah modernnya relation bisine atau lainnya, tetapi kalau kita kaji secara fiqh secara garis besar syirkah itu dibagi menjadi dua macam :

a. Syirkah Amlak (Hak milik)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat

⁴⁷ *Ibid.*, h. 130

ikhtiari atau jabari.⁴⁸ Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab :

- 1) syirkah amlak jabari (berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa)
- 2) syirkah amlak ikhtiyar (berkumpul dua orang atau lebih dalam pemi-
likan benda dengan ikhtiyar keduanya).

b. Syirkah Uqud (Transaksional)

Syirkah transaksional (syirkatul uqud) adalah kerjasama antara dua orang yang bersekutu atau lebih dalam modal dan keuntungan.⁴⁹ Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah uqud adalah ijab dan kabul. Seperti seseorang berkata, “Saya berserikat dengan kamu dalam masalah ini.” Orang satu lagi menjawab, “Saya terima.” Sedangkan rukun perseroan menurut Jumhur ada tiga, yaitu *aqidan* (dua orang yang akad), *ma'qud alaih* (harta/laba), dan *sighat* (ucapan).⁵⁰

Mayoritas ulama’ membagi syirkah uqud menjadi empat bagian yaitu:

1). Syirkah ‘Inan

Yang dimaksud dengan syirkah ‘inan ialah mengeluarkan semua harta untuk digabung menjadi satu, kemudian dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dibagi dua sebagaimana kadar harta yang

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz III, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), h. 932.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op.Cit.*, h. 131.

⁵⁰ Al-Kasani, *Op.Cit.*, h. 56

dikeluarkan. Menurut para ulama' ini adalah model *syirkah* yang diperbolehkan. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai persentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal.⁵¹

Jenis *syirkah* ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, karena tidak disyaratkan adanya kesamaan modal, usaha dan tanggung jawab. Dan hukum *syirkah* ini diperbolehkan berdasarkan konsensus para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Mundzir.⁵²

Contoh *syirkah inan*: A dan B pengrajin atau tukang kayu. A dan B sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjualbelikan meubel. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp.50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini, diisyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*'urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*, h. 932.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Ardilatuhu*, Juz IV, h. 796.

masing menanggung kerugian sebesar 50%. sebagaimana kaidah fikih yang berlaku, yakni:

الرَّابِحُ عَلَى مَا شَرَّ طَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ.

Artinya: “Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya.”

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jami'*, bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).⁵³

2). Syirkah wujud

Yang dimaksud dengan syirkah wujud ialah perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu. Yang terjadi hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai.

Syirkah semacam ini mirip dengan makelar. Kerjasama antar tiga pihak yang mana pihak kedua dan ketiga tidak mengeluarkan modal, dan

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 189.

hasilnya dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu. Disini asas yang ditekankan adalah *al-Siddiq wa Al-Amanah*.⁵⁴

Dicontohkan misalnya, pihak A (Pedagang Besar) dan B (PT. Farmasi) dan C (Apotek) bekerja sama, modal yang digunakan yaitu modal si A, sedangkan si B dan C ikut mengelola usaha tersebut tanpa mengeluarkan modal. Pihak B menyalurkan barang dagangan yang di modalkan Pihak A ke Pihak C untuk diperjualkan. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada A (Pedagang besar).

Dalam *syirkah wujuh* ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan pendapat pertama yang membolehkan perkongsian ini, keduanya dibolehkan mendapat keuntungan masing-masing setengah atau lebih dari setengah sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Pendapat ini antara lain didasarkan pada hadis Nabi SAW. :

اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Bagian orang-orang Islam bergantung pada syarat yang mereka (sepakati).”⁵⁵

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op.Cit.*, h. 134.

Dalam segi keuntungan, hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab perkongsian ini didasarkan pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan pun harus diukur berdasarkan tanggung jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing.⁵⁵

3). Syirkah Mufawadhah

Yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam Syirkah Mufawadhah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi menjadi mufawadhah, tetapi al-inan. Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut.

- a) Modal harus sama banyak, bila ada salah satu diantara mereka lebih banyak modalnya maka syirkah tersebut tidak sah.
- b) Memiliki kekuasaan absolut terhadap serikat tersebut.
- c) Satu agama, atau sesama muslim.
- d) Memiliki hak untuk mengelola dan menentukan keuntungan.

Syirkah Mufawadhah juga merupakan *syirkah* komprehensif yang dalam *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam

⁵⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II., h. 252.

⁵⁶ *Ibid.*

semua jenis kerja sama, seperti *'inan*, *abdan* dan *wujuh*. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. atau *syirkah* ini bisa pula diartikan kerja sama dalam segala hal. Namun tidak termasuk dalam *syirkah* ini berbagai hasil sampingan yang diduplikannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi *syirkah* , mengganti barang-barang yang dirusak dan sejenisnya. Ulama Hanafiah dan Zaidiyah membolehkan perkongsian semacam ini yang didasarkan antara lain pada sabda Nabi SAW. :

فَأَوْضُوا فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْبَرَكَةِ

Artinya: “Samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah.”

Dengan demikian, syarat utama dari *Syirkah* ini adalah kesamaan dalam hal-hal berikut: Dana (modal) yang diberikan, kerja, tanggung jawab, beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.⁵⁷

Hukum *Syirkah* ini dalam pengertian di atas dibolehkan menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 259-260

digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Namun, imam asy-Syafi'i melarangnya.

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inan*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudharabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujuh*).⁵⁸

Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah 'abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja.

Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudharabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola.

Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inan* di antara B dan C.

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 190.

Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujuh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut *syirkah mufawadhah*.⁵⁹

4). Syirkah Abdan

Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha atau pekerjaan atau lebih mudahnya persekutuan dua orang atau lebih untuk menerima kerja yang akan dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dibagi bersama, seperti pemborong bangunan. Instalasi listrik, atau pekerjaan diantara dua penjahit.

Masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah.

Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, namun Imam Syafi'i melarangnya.

Syirkah ini kadang-kadang disebut juga dengan *Syirkah al-A'maal* dan *ash-Shanaa-i'*.

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah 'abdan*

⁵⁹ *Ibid.*

terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang besi. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal.⁶⁰

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*).

Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Syirkah 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah. Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu anhu*, ia berkata, “*Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.*” (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Hal itu diketahui Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dan beliau membenarkannya dengan *taqrir*.⁶¹

5. Berakhirnya Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila:

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*, h. 260.

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 193.

apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham syirkah.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisah lagi, maka menjadi resiko bersama.⁶²

C. Sistem Konsignasi

1. Pengertian Konsignasi

Konsignasi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai barang dagangan menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak lain untuk

⁶² Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 133-134

dijualkan dengan memberikan sejumlah komisi kepada pihak yang menjualkan.

Penjualan Konsignasi adalah merupakan suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan.⁶³

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Penjualan konsignasi disebut juga dengan penjualan titipan, kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titipan).⁶⁴

Pada dasarnya semua penjualan konsignasi tersebut adalah:

- a. Unsur perjanjian
- b. Unsur pemilik barang
- c. Unsur pihak yang dititipi barang
- d. Unsur barang yang dititipkan
- e. Unsur penjualan
- f. Unsur komisi

Mengabaikan salah satu unsur tersebut akan membuat transaksi tidak dapat disebut penjualan konsignasi, oleh karena itu seluruh unsur tersebut harus ada pada saat penjualan konsignasi.

Dalam hubungan penjualan konsignasi tersebut, pemilik barang disebut pengamat (consignor) dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai komisioner (consignee), barang yang dikirim pengamat atas penjualan

⁶³ Arifin, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*, Ed. Revisi Ke-3, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Leberty, 2012), h. 147.

⁶⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed-4. (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008), h. 125.

konsignasi disebut barang konsignasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsignasi disebut barang komisi.

Pengamanat (consignor) menetapkan komisioner (consignee) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang itu terjual kepada pihak ketiga. Atas penjualan barang-barang ini, pihak komisioner menyerahkan hak atas barang-barang ini dan juga hasil penjualannya. Pihak komisioner tidak memiliki kewajiban terhadap pihak pengamanat selain tanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya.⁶⁵

Penjualan konsignasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, umumnya hak milik barang telah pindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan konsignasi hak milik barang tetap berada ditangan pengamanat. Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya.

Perbedaan yang lain adalah dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan reguler, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung sendiri oleh pihak penjual. Tetapi dalam penjualan barang konsignasi akan ditanggung oleh pihak pengamanat (pemilik barang).⁶⁶

⁶⁵ Allan R. Drebin, *Advanced Accounting* (Akuntansi Keuangan Lanjutan), ahli bahasa oleh Freddy Sarangih, et. al. Cet. Ke-1 1991, (Jakarta: Erlangga), h.158.

⁶⁶ Arifin, *Op.Cit*, h. 147-148.

2. Pihak-pihak Konsignasi

- a. Konsinyor (Consignor) adalah Pihak yang memiliki barang.
- b. Konsinyi (Consignee) adalah Pihak yang mengusahakan penjualan barang.

1) Alasan Konsinyor

- a) Memungkinkan produsen memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas, terutama : barang baru, barang mahal, harga berfluktuasi
- b) Memperoleh spesialis penjualan
- c) Harga jual eceran dapat dikendalikan

2) Alasan Konsinyi

- a) Terlepas dari resiko kegagalan penjualan barang
- b) Resiko kerusakan fisik dan fluktuasi harga dapat dihindari
- c) Kebutuhan modal kerja berkurang

3. Sistem Operasi Penjualan Konsignasi

Dalam melakukan penjualan konsignasi, pengamanat dan komisioner harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Adapun isi perjanjian tersebut, antara lain:⁶⁷

- a. Beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung oleh pengamanat. Misalkan seperti beban pengangkutan, beban reparasi, beban pekerja, beban sewa gudang, dan lain sebagainya.
- b. Kebijakan harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh komisioner atas instruksi dari pengamanat.

⁶⁷ Allan r. Drebin, *Op.Cit.*, h.159

- c. Komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamanat kepada komisioner.
- d. Laporan pertanggung jawaban oleh komisioner kepada pengamanat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut.
- e. After sales service (garansi) yang harus ditanggung oleh pengamanat atas barang-barang yang telah dijual oleh komisioner.
- f. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

4. Hak dan Kewajiban Dari Komisioner

- a. Hak Pihak Komisioner (Consignee) memiliki beberapa hak dalam penjualan konsignasi. Yaitu Pihak komisioner (Consignee) berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan yang berkaitan dengan barang konsignasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan produk konsignasi. Pengeluaran yang dibutuhkan tergantung pada sifat ataupun jenis produk konsignasi, yang meliputi pengangkutan, asuransi, pajak, penyimpanan, penanganan, reparasi di bawah garansi, dan beberapa pengeluaran lain yang biasanya ditanggung oleh pihak pengamanat (Consignee)⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*

b. Kewajiban Pihak Komisioner (Consignee)

Sebagai penerima amanat dalam penjualan konsignasi, komisioner (Consignee) memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya:⁶⁹

- 1) Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjualkan barang konsignasi tersebut dengan harga dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Pihak komisioner harus melindungi barang-barang pihak pengamanat dengan cara yang baik, menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang konsignasi dari kecurian, kebakaran, kerusakan, dan resiko fisik lainnya.
- 3) Mengelola secara fisik maupun akuntansi terhadap barang-barang konsignasi agar mudah diidentifikasi.
- 4) Pihak komisioner harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsignasi. Laporan ini berisi informasi mengenai barang konsignasi yang diterima, barang konsignasi yang dijual, harga jual, biaya penjualan, jumlah yang terhutang, dan jumlah (uang) yang dikirim.

Disamping beberapa kewajiban di atas, komisioner Juga diberi kepercayaan oleh Pengamanat untuk mengumpulkan atau menerima uang hasil penjualan barang konsignasi. Setelah uang dikumpulkan dan setelah

⁶⁹ Arifin, *Op.Cit.*, h. 159-160.

diadakan penyesuaian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan olehnya, uanghasil penjualan tersebut baru disetorkan kepada Pengamanat.

Apabila komisioner lebih dahulu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan barang konsignasi, maka komisioner berhak untuk meminta ganti atas pengeluaran uang tersebut.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi singkat Obyek Penelitian

1. Profil Apotek Campang Raya Kelurahan Campang Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Secara geografis Apotek Campang Raya berada di Jalan Ryacudu No. 81 RT/RW 07/01 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dan berubah menjadi Jalan Alimudin Umar No. 81 RT/RW 07/01 Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi Bandarlampung. No. SIA : 442.4.260.09.2014. Nomor Telp : 0721-7622326. Apotek ini adalah Apotek satu-satunya yang berada di daerah Campang Raya tersebut dari tahun 2011-2017 awal, sebelum adanya Apotek lain (Apotek Yogya) yang baru di buka di pertengahan tahun 2017 ini di daerah Campang Raya.

Batas-batas wilayah Apotek Campang Raya Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gang Jalan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Ruko-ruko milik Ibu Tariah, yang dihuni oleh Pak Iwan yang berjualan Bakso dan Mie Ayam

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan raya campang raya, berhadapan dengan Puskesmas Campang Raya

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah Ibu Tariah

Pemilik pertama dari Apotek Campang Raya adalah seorang Apoteker yang bernama Budi yang juga memiliki Apotek MM Farma di Jalan Hayam

Wuruk Kedamaian Bandarlampung. Namun pada tahun 2014 Apotek Campang Raya di jual kepada Adik Iparnya sebagai Pemilik Sarana Apotek (P.S.A) yang bernama Resilia Sapta Putri, Tempat Tanggal Lahir di Tanjung Karang pada tanggal 9 Agustus 1982, Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Resilia beralamat di Jalan Mayjend Sutyoso Nomor 132, Rukun Tetangga 007, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandarlampung.

Adapun Apoteker pertama yang menjadi pengelola Apotek Campang Raya adalah Apoteker Dewi Puspita N,S. FARM.APT dengan No. SIPA : 442.4.152.09.2012. Apoteker Dewi merupakan Apoteker yang di tunjuk oleh Pak Budi selaku pemilik sarana Apotek Campang Raya yang pertama. Setelah Jual beli Apotek Campang Raya berlangsung kepada Resi selaku pemilik sarana Apotek yang baru, dan telah habis juga masa Apoteker Dewi sebagai Apoteker Pengelola Apotek Campang Raya (A.P.A). Ibu Resi menunjuk Apoteker lain menjadi Apoteker Pengelola Apotek Campang Raya (A.P.A) yang bernama Ahmad Junaidi. S.Si., Apt. dengan No. SIPA : 19810305/SIPA-18.71/2016/1065.¹

Tempat Tanggal Lahir di Siderejo pada tanggal 15 Maret 1981, Pekerjaannya sebagai Kepala Sekolah dari SMK Farmasi Cendikia Bandarlampung dan Pimpinan Apoteker Bandar Lampung. Junaidi beralamat di Jalan P. Marotai gang Masjid, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung.

¹ Surat Pesanan Apotek Campang Raya, Dicatat tanggal 16 November 2017.

Apotek Campang Raya bekerja sama atas salur menyalurkan obat dengan Apotek MM Farma, Apotek Adisa dan Apotek Raja, karena Apotek Apotek tersebut memiliki hubungan keluarga. Apotek Campang Raya juga bekerja sama dengan berbagai PT maupun CV yang ada di Bandarlampung maupun diluar kota Bandarlampung.

2. Pengelolaan Apotek Campang Raya

Apotek Campang Raya, merupakan salah satu apotek milik Resilia Sapta Putri, Apotek ini memiliki struktur pegawai yang terdiri dari :

Apoteker Pengelola Apotek : Ahmad Junaidi, S.Si.,Apt

Pemilik Sarana Apotek : Resilia Sapta Putri

Karyawan biasa (penjual obat) : Ardila

Apotek Campang Raya memiliki dua ruang yang digunakan sebagai pelaksanaan sehari-hari yaitu :

Ruang depan : Sebagai tempat pekerjaan penjualan obat bebas dan pelayanan resep dokter.

Ruang dalam : Sebagai tempat obat-obat dalam (khusus) dan tempat peracikan resep.

Selain itu Apotek Campang Raya dibuka pada hari senin s/d minggu (setiap hari) pada pukul 08.00-21.30 WIB. Apotek Campang Raya memiliki pegawai berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang APA (Apoteker Pengelola Apotek), 1 orang sebagai kasir dan penjualan obat.

a. Tugas Dan Tanggung Jawab

1) Apoteker Pengelola Apotek

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan obat dan pencatatan pelaporan di Apotek.
- b) Mengawasi dan membina pelaksanaan pengelolaan obat dan pencatatan pelaporan.
- c) Mengajukan permintaan obat kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF).
- d) Menyampaikan laporan bulanan pemakaian obat kepada Kadinkes Dati I setempat.

2) Karyawan Apotek

- a) Menerima, menyimpan, memelihara obat yang ada di Apotek membuat catatan dalam kartu stok.
- b) Menghitung uang KAS sebelum melakukan pergantian sifit
- c) Menerima resep obat.
- d) Membantu Apoteker dalam melakukan peracikan obat dan sebagainya.
- e) Mencatat apabila terjadinya Retur barang
- f) Bertugas melakukan Tensi.
- g) Menata dan merapikan obat-obat.
- h) Mempersiapkan laporan permintaan obat.
- i) Menulis dan merekap barang-barang yang akan di order ke PBF
- j) Menerima, menyimpan dan memelihara bukti serah terima barang berupa faktur.
- k) Mencatat di buku tagihan apabila ada faktur-faktur masuk.

- l) Mencatat omset dari setiap sif yang dijaga.
- m) Mempersiapkan laporan obat hilang, rusak dan kadaluarsa.
- n) Melaporkan obat yang tidak dipakai, hilang, rusak dan kadaluarsa kepada Kepala Apotek.
- o) Menyimpan kartu stok

b. Tata Ruang Apotek

Ruang depan digunakan sebagai tempat pekerjaan penjualan bebas dan pelayanan resep dokter, sebagai berikut :

- 1) Pintu
- 2) Rak obat-obat bebas dipasaran obat
- 3) Komputer penjualan yang menggunakan data base Acossys
- 4) Lemari Perlengkapan ATK
- 5) Timbangan berat badan
- 6) Pengukur tinggi badan

Ruang dalam digunakan Sebagai tempat obat-obat dalam (khusus) dan tempat peracikan resep, sebagai berikut :

- a) Rak obat generic (tablet, dry sirup, salep, injeksi)
- b) Rak obat anti infeksi
- c) Rak obat saluran pernapasan
- d) Rak obat alergi dan system imun
- e) Rak obat salep-salep
- f) Rak obat-obat paten
- g) Rak obat saluran pencernaan

- h) Rak obat nutrisi
- i) Rak obat jantung dan peredaran darah
- j) Vitamin dan mineral
- k) Rak obat syr Generik
- l) Rak obat dermatologi mata
- m) Rak penyimpanan surat faktur
- n) Tempat pencuci tangan
- o) Meja racikan
- p) Lemari pendingin
- q) WC
- r) TV

3. Pengelolaan Barang

a. Pemesanan Barang

Disiapkan surat pemesanan barang rangkap dua, satu untuk penyalur barang dan satu sebagai arsip Apotek.

b. Penyimpanan

- 1) Karyawan mencatat seluruh penerimaan barang hari itu dalam buku harian penerimaan barang
- 2) Mencatat semua surat pengiriman barang ke kartu stok
- 3) Menyimpan barang sesuai dengan jenis dan sifat barang
- 4) Barang tertentu disimpan di tempat terpisah, misalnya:
 - a) Narkotika, disimpan di lemari terkunci
 - b) Serum, vaksin dilemari pendingin

c) Bahan yang mudah terbakar di tempat tersendiri

c. Penjualan

1) Penjualan obat bebas, alkes dan lain-lain:

- a) Setiap pembelian obat bebas diberikan tanda bukti struk pembelian dengan tercantum tanggal, nama barang, banyak harga satuan dan jumlah.
- b) Input barang yang dibeli ke dalam komputer

2) Penjualan obat dengan resep dokter:

- a) Resep yang diterima dari pasien diberi harga sambil mengontrol ketersediaan obat dan diserahkan pada pasien lagi.
- b) Pasien membayar ke kasir harga obat yang akan diambil sesuai dengan resep tersebut dan ditandai jumlah yang akan diambil serta catat nama, umur. Alamat yang lengkap di belakang resep
- c) Resep yang sudah lunas diserahkan kepada Karyawan apoteker yang bertugas untuk:

- (1) Menghitung komposisi obat
- (2) Menyiapkan etiket
- (3) Menyiapkan obat/ bahan baku obat
- (4) Meracik obat sesuai ketentuan yang berlaku
- (5) Pengemasan obat yang sudah selesai diracik

d) Obat yang sudah selesai diracik dikemas dan dikontrol kembali

- (1) Obat dan perhitungan dosis
- (2) Kelengkapan Resep obat yang sesuai nama pasien
- (3) Komposisi bahan obat yang sudah diracik

- e) Penyerahan obat oleh petugas yang telah ditentukan dengan control yang ketat antara nomor dan nama pasien harus sesuai
- f) Paraf pasien yang telah meminta atau mengambil obat tersebut
- g) Resep yang sudah dikerjakan dilampirkan dengan kalkulasi perhitungan harga pokok obat + laba + obat R/ (rangkap 2)
- h) Resep yang sudah dikerjakan dengan kalkulasi harga obat, disimpan secara teratur sesuai tanggal, bulan dan tahun
- i) Kalkulasi harga pokok obat diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicatat.

d. Pengendalian Persediaan

Tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara besarnya persediaan dengan besarnya permintaan barang. Besar kecilnya volume pengendalian di Apotek dan di Pedagang Besar Farmasi (PBF) ditentukan, oleh:

1) Kecepatan bergerak atau berputar²

Barang yang mempunyai kecepatan Bergeraknya cepat (*Turn over tinggi*) disediakan banyak (*Product fast moving*) = Produk yang bergerak cepat). Sedangkan barang yang mempunyai *Turn Over Rendah*, disediakan lebih sedikit (*Product Slow Moving*) = Produk yang bergerak lambat).

² Sumber dari Administrasi Farmasi Jilid III

2) Persediaan Barang

Apotek dikota persediaannya cukup disediakan untuk 1 bulan, sedangkan diluar kota persediaan barang disediakan untuk beberapa bulan omset.

3) Kebutuhan perbulan

Pembeli berdasarkan kebutuhan perbulan diartikan pengadaan barang sebesar harga pokok atau *Cost of Good Sold* (C.G.S)

Pengelolaan obat di Apotek Campang Raya sudah hampir sama dengan teori yang telah ditentukan. Pengelolaan obat di Apotek Campang Raya dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pencatatan, dan pengeluaran obat. Obat yang hampir habis atau sudah habis dicatat di buku defecta lalu ditulis kembali disurat pesanan berapa jumlah barang yang akan di pesan. Kemudian surat pesanan diperlihatkan kepada APA dan ditandatangani oleh APA.

Apotek Campang Raya memesan obat atau barang tidak hanya di PT Ganta Usaha Tenggalaan saja namun juga banyak dari PBF-PBF lainnya. Setelah barang atau obat yang dipesan diterima, barang atau obat tersebut dicek kembali oleh karyawan Apotek. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pemesanan. Setelah itu barang dan obat tersebut di input dalam komputer dan disusun

4. Pengelolaan Administrasi

Pengelolaan administrasi di Apotek Campang Raya semua harga obat atau barang sudah tercantum semua di komputer. Komputer di Apotek Campang Raya selalu on line. Penghasilan Apotek dicatat dalam bukti setoran karyawan.

Pembukuan yang ada di Apotek Campang Raya terdiri dari:

- a. Rekap tagihan
- b. Kartu stok
- c. Buku salinan resep (kopy resep)
- d. Blanko kwitansi
- e. Buku Stock Opna

B. Pelaksanaan Praktik Konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya

PT Ganta Usaha Tenggalan terletak di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Griya Gembira Blok II E No.1-2 Wayhalim Permai, Bandar Lampung 351135. Phone (0721) 3555261- (0721) 3555262, Fax. 0721785944.

Keagenan Konsignasi PT Ganta Usaha Tenggalan di semua Apotek dalam Kota Bandar Lampung dikepalai oleh : Mei Kristiyani, S.Far.Apf
1983526/SIKA _18.71/2015/2231

Status : Pusat

Jenis : Obat

No PBF : P-1139

No Izin : HK.07.01/V/131 /12.
 Tahun : 2016.
 Apoteker Penanggung Jawab Obat : Mei Kristiyani. S. Far., Apt.
 Nomor STRA : 19830520/STRA-UAD/2007/21356

Pelaksanaan konsignasi yang diterapkan dan dilaksanakan oleh PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya merupakan kerjasama antara PT Ganta Usaha Tenggalan sebagai pemasok barang dan Apotek Campang Raya sebagai penerima barang. Adapun prosedur perjanjian yang dilakukan oleh PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan keagenan konsignasi

Kesepakatan konsignasi antara kedua belah pihak adalah hal yang sangat diperlukan demi kelancaran dalam pelaksanaan jual beli, dengan adanya kesepakatan yang dibuat bersama, maka akan terjalinnya hubungan keagenan yang bersifat terbuka, tanpa ada salah satu pihakpun yang dirugikan. Kesepakatan antara PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya berbentuk lisan, kesepakatan keagenan konsignasi sebagai berikut :

- a. Negosiasi mengenai barang konsignasi
- b. Penetapan komisi (yang biasa disebut discount) apabila pengambilan barang berjumlah banyak.
- c. Jangka waktu atau jatuh tempo barang konsignasi yang di berikan PT Ganta Usaha Tenggalan kepada Apotek Campang Raya selama 30 hari

- d. Prosedur pengiriman barang dalam 1 hari pemesanan
- e. Prosedur retur barang konsignasi apabila barang yang bukan dipesan dan tidak di dalam surat pesanan serta barang-barang yang sudah rusak.
- f. Prosedur pembayaran, Apotek Campang Raya akan membayar sebesar nominal di faktur yang sudah jatuh tempo kepada pihak penagih dari PT Ganta Usaha Tenggala.

2. Cara Pemesanan Barang

Adapun cara pemesanan obat yang dilakukan Apotek Campang Raya ke PBF PT Ganta Usaha Tenggala, yaitu dengan cara:

- a. Barang yang kosong ditulis dalam buku defecta.
- b. Pisahkan obat berdasarkan PBF.
- c. Buat surat pesanan ke PBF Ganta Usaha Tenggala yang sudah ditandatangani oleh APA.
- d. Ketika barang atau obat datang dicek tanggal kadaluarsanya, baik buruknya obat dan sesuai dengan surat pesanan.

Sedangkan apabila ada barang yang tidak sesuai dan ada barang yang ternyata cacat yang dilakukan sengaja ataupun tidak maka wajib melakukan Retur barang, namun apabila barang tersebut sudah memenuhi dan sesuai surat pesanan yang dipesan Apotek Campang Raya, ketika barang atau obat tersebut sudah dicek maka, obat atau barang tersebut disusun di lemari sesuai dengan khasiat dan abjad lalu di input ke komputer untuk penginputan barang masuk serta dicatat di kartu stok.

Golongan obat yang ada di Apotek Campang Raya adalah obat generik, obat paten, tetes mata, salep mata, salep kulit, obat antibiotic dan lain sebagainya. Penyimpanan dan penyusunan semua obat di Apotek Campang Raya disusun berdasarkan abjad dan kegunaannya..

Pengeluaran obat atau barang di Apotek Campang Raya menggunakan sistem FIFO (first in first out) dan FEFO (first expire first out).

FIFO adalah barang yang masuk dahulu diletakkan dibagian depan agar memungkinkan diambil dulu atau keluar duluan.

FEFO adalah barang yang mendekati expire date diletakkan dibagian depan agar cepat keluar dan kemungkinan barang yang expire date tidak terjual kecil.

3. Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT. Ganta Usaha Tenggalan

Alamat : Jalan Griya Gembira Blok II E No.1-2 Wayhalim Permai,
Bandarlampung 351135

Apoteker Penanggung Jawab Obat : Mei Kristiyani. S. Far., Apt.

Nomor STRA : 19830520/STRA-UAD/2007/21356

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Apotek Campang Raya

Alamat : Jalan Alimudin Umar No. 81 RT/RW 07/01 Kelurahan
Campang Raya, Kecamatan Sukabumi Bandarlampung.
No. SIA : 442.4.260.09.2014

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan surat ini menyatakan sepakat untuk melakukan perjanjian
kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam surat perjanjian kerjasama ini Pihak pertama titip jual barang-
barang konsignasi kepada Pihak Kedua untuk menjualkan barang-barang
konsignasi kepada konsumen.

.Pasal 2

Pihak Pertama memberikan keuntungan dari penjualan sebesar 10% dari harga pokok Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Biaya operasional akan ditanggung oleh pihak pemilik barang dan akan diberikan *fee* apabila penjualan memenuhi target penjualan.

Pasal 3

Pihak Kedua wajib membayar hasil penjualan kepada Pihak Pertama apabila barang-barang konsignasi tersebut sudah terjual dan sudah jatuh tempo dalam jangka waktu 1 bulan.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan disetujui bersama serta tanpa ada suatu unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandarlampung, 18 Juli 2016

Pihak Pertama

PihakKedua

M. Agung Perkasa

Resilia Sapta Putri

4. Modal, Keuntungan dan Kerugian dalam pelaksanaan penjualan

Konsignasi

Sudah menjadi suatu kebutuhan pada masyarakat Campang Raya Kec. Sukabumi Bandar Lampung, kalau masyarakat banyak yang melakukan transaksi jual beli di Apotek Campang Raya, baik itu jual beli obat-obatan, maupun produk lainnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Modal

Dalam sistem konsignasi pihak yang mengeluarkan modal adalah pihak PT. Ganta Usaha Tenggala. Dari mulai biaya operasional dan biaya modal dalam barang-barang konsignasi itu yang mengeluarkannya adalah PT. Ganta Usaha Tenggala, karena dilihat dari ketidakberpindahan pemilik barang bahwa barang tersebut masih hak milik PT. Ganta Usaha Tenggala, dan pihak Apotek Campang Raya hanya sebagai penjualan barang-barang konsignasi. Adanya sistem keagenan konsignasi yang dipraktikkan PT. Ganta Usaha Tenggala dengan Apotek Campang Raya merupakan perluasan dalam penjualan barang-barang konsignasi tersebut, agar masyarakat luas mengetahui dan membeli produk dari barang-barang konsignasi.

b. Keuntungan

1) Keuntungan Bagi Pihak Pengamanat (PT. Ganta Usaha Tenggala)

Berikut beberapa keuntungan yang diperoleh oleh pengamanat dalam penjualan konsignasi:

Untuk memperluas daerah pemasaran suatu produk oleh pengamanat (PT. Ganta Usaha Tenggalan) yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a) Memperkenalkan produk baru, dimana masyarakat belum mengetahui produk tersebut.
- b) Untuk membuka devisi penjualan di suatu daerah yang merupakan suatu investasi yang sangat mahal.
- c) Barang konsignasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak Apotek Campang Raya sehingga resiko kerugian dapat ditekan.
- d) Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat, hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih di tangan pengamanat sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen. Pengawasan harga ini akan sulit jika menggunakan sistem penjualan melalui dealer yang kepemilikan barangnya sudah ditangan dealer itu sendiri.
- e) Jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada digudang mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi.³

³ Arifin, *Loc, Cit*, h. 148-149.

2) Keuntungan Bagi Pihak Komisioner (Apotek Campang Raya)

Bagi komisioner ada beberapa keuntungan yang diperoleh melalui penjualan konsignasi. Antara lain:

- a) Komisi yang akan didapat apabila barang konsignasi laku terjual adalah 10%. Apotek Campang Raya tidak dibebani resiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang-barang konsignasi.
- b) Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasional penjualan konsignasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh pengamanat.
- c) Apabila terdapat barang konsignasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggungan komisioner (hal ini sangat penting terutama bila barang konsignasi tersebut berupa buah-buahan, atau produk pertanian lainnya).
- d) Kebutuhan modal kerja dapat dikurangi, sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjualan barang konsignasi untuk pengamanat.
- e) Komisioner berhak menerima pendapatan berupa komisi dari hasil penjualan konsignasi.⁴

⁴ Arifin, *Loc.Cit*, h.149

c. Kerugian

Apabila ada kerugian yang timbul adalah diakibatkan kedua belah pihak yang melakukan kecurangan dalam melakukan kerjasama, ketika pihak Apotek Campang Raya mangkir dalam pembayaran barang-barang konsignasi yang sudah terjual dan sudah jatuh tempo, maka akan menghambat produksi PT. Ganta Usaha Tenggala, yang harusnya dari hasil uang penjualan tersebut dapat PT Ganta Usaha Tenggala gunakan untuk keperluan produksi barangnya lagi. Namun ketika Apotek Campang Raya mangkir dalam pembayaran maka itu merupakan kerugian bagi pihak PT. Ganta Usaha Tenggala.

Dengan itu juga Pihak PT. Ganta Usaha Tenggala pun mangkir dalam pembiayaan Operasional, yang seharusnya itu merupakan tanggungan mereka, tidak hanya itu saja *fee* yang dijanjikan tidak kunjung turun, ini merupakan kerugian yang telah dirasakan oleh Apotek Campang Raya.

Berdasarkan hasil interview dengan penjual yang ada di Apotek Campang Raya yaitu dengan Ibu Resilia⁵ dan seorang karyawannya yang bernama Dila. Menurut Ibu Resilia yang berusia 35 tahun selaku yang memiliki Apotek Campang Raya dan juga sebagai penjual produk konsignasi dari PT. Ganta Usaha Tenggala, beliau yang biasa menggunakan transaksi jual beli konsignasi dengan sistem kerjasama atau Syirkah oleh PBF-PBF lain. Namun ada perbedaan ketika beliau melakukan kerjasama dengan pihak PT. Ganta, bahwa didalam kerjasamanya itu ada

⁵ Resilia Septa (komisioner), Wawancara, di Apotek Campang Raya, tanggal 10 Desember 2017

terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak Ganta dengan Apotek Campang Raya, Bahwa ada terjadinya kecurangan yang timbul dalam kerjasama keagenan konsignasi yang dilakukan oleh PT.Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya Kec. Sukabumi Kel. Campang Raya Bandar Lampung, yaitu :⁶

PT Ganta Usaha Tenggalan tidak menentukan harga jual produk sedangkan dia mempunyai hak mutlak dapat dilihat dari hak kepemilikan barang tersebut, dan bonus serta *fee* yang dijanjikan tidak direalisasikan.

Ardila yang biasa dipanggil Dila yang berusia 18 tahun yang merupakan karyawan Ibu Resi mengatakan, terkadang ada barang yang kurang dan tidak sesuai dengan faktur ketika melakukan pengulangan kembali apabila barang-barang konsignasi tersebut datang. Hal tersebut dilakukan supaya barang yang diterima Apotek Campang Raya sesuai dengan faktur pesanan yang diberikan oleh Pihak PT Ganta Usaha Tenggalan, terkadang ada saja barang yang cacat kemasannya, dan juga sesekali PT Ganta Usaha Tenggalan telat untuk mengganti atas barang yang cacat tersebut, dan barang-barang yang telah di retur.

Berbeda lagi wawancara dengan pihak PT. Ganta Usaha Tenggalan, yaitu dengan Mas Agung⁷ dan Mas Rudi,⁸ selaku penyalur barang ke

⁶ Ardila (komisioner), *Wawancara*, di Apotek Campang Raya, tanggal 10 Desember 2017

⁷ Agung, Pengamanat / Kolektor, *Wawancara*, di PT Ganta Usaha Tenggalan Wayhalim Permai Bandar Lampung, 10 Desember 2017.

⁸ Rudi, Pengamanat / salesman, *Wawancara*, di PT Ganta Usaha Tenggalan Wayhalim Permai Bandar Lampung, 10 Desember 2017.

Apotek Campang Raya dan juga sebagai penagih hutang piutang yang dibebankan Apotek Campang Raya,

Mas Agung yang berusia 31 tahun, pekerjaannya sebagai kolektor PT Ganta Usaha Tenggalan, beliau mengungkapkan bahwa ketika pada saat penagihan serta sudah jatuh tempo dan barang-barang konsignasi tersebut sudah laku terjual, Apotek Campang Raya harus membayarnya, namun hampir setiap penagihan, beliau hanya mengungkapkan kekecewaanya karena tidak mendapatkan uang dari barang- barang yang sudah terjual tersebut. Dikarenakan pihak apotek banyak sekali alasan-alasan, sehingga terkadang hal itu membuat beliau tatkala sering mendapat teguran dari pihak atasannya. Padahal barang-barang konsignasi tersebut sudah jatuh tempo pembayaran, dimana sudah tertera di perjanjian awal pada saat kerjasama berlangsung.

Adapun masalah lain yang didapatkan, berupa uang hasil penjualan yang ada di Apotek Campang Raya. Menurut Mas Rudi selaku sales PT Ganta Usaha Tenggalan, dia mengetahui bahwa pihak Apotek menggunakan hasil penjualan dari barang konsignasi tersebut untuk kepentingan pribadi, ini salah satu faktor hingga terlambat bahkan mangkir dari pemenuhan kewajiban kepada PT. Ganta Usaha Tenggalan. Padahal di perjanjian awal atau akad yang telah berjalan dari awal yaitu pihak Apotek Campang Raya wajib membayar hutang dari barang konsignasi yang telah terjual dan sudah jatuh tempo 30 hari dari barang konsignasi itu telah dikirim.

5. Teknis Pembayaran Barang dengan sistem konsignasi

Pembayaran secara konsignasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian, barang yang dijual merupakan barang titipan yang pembayarannya dengan termin waktu.

Ketika kolektor menagih pembayaran dari barang-barang konsignasi yang sudah terjual dan jatuh tempo, maka yang dilakukan Apotek Campang Raya adalah mencari copy rekapan faktur. Usahakan faktur asli dari pihak PT Ganta sesuai seperti rekapan yang diberikan kepada pihak Apotek pada saat penagihan, agar tidak ada terjadinya manipulasi. Ketika faktur sesuai dan harga yang tercantum sama nominalnya, maka yang dilihat selanjutnya adalah tanggal jatuh temponya, ketika jatuh tempo sudah lewat maka pihak Apotek wajib membayar uang penjualan dari barang konsignasi tersebut. Pembayaran secara langsung atau tunai dibayarkan dari pihak Apotek Campang Raya kepada PT Ganta Usaha Tenggala melalui kolektor yang menagih, dan memberikan faktur asli kepada pihak Apotek beserta cap atau tanda tangan kolektor bahwa faktur tersebut dinyatakan lunas.

BAB IV

ANALISIS

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, beserta data kepustakaan, baik yang diperoleh langsung dari jurnal-jurnal, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Keagenan Konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggala Dengan Apotek Campang Raya”, maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil analisa sebagai berikut :

A. Sistem Keagenan Konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggala dengan Apotek Campang Raya

Apotek Campang Raya memberikan jasa pelayanan berupa penjualan obat, baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dokter. Jenis obat di apotek ini beraneka ragam, dari obat yang berdosis tinggi, dosis menengah hingga dosis ringan. Dari obat ber-merk sampai obat generik juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini pengelolaan penjualan obat pada Apotek Campang Raya dilakukan secara input komputer dan manual jika mati lampu. Jumlah obat yang dijual semakin bertambah banyak, obat-obat tersebut disusun dalam rak kaca dan diatur berdasarkan jenis atau kelompok obat tertentu. obat paten dan obat generik harus dipisahkan penempatannya.

Pelayanan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatkannya jumlah kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis obat, disamping itu juga untuk meningkatkan daya saing dengan Apotek sejenisnya yang juga meningkatkan mutu atau kualitas pelayanannya. Karena tingkat transaksi di Apotek tinggi maka terjadi beberapa permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka akan dibuat suatu sistem yang bisa mengatasi permasalahan yang ada di Apotek Campang Raya, dengan mengambil sistem keagenan konsignasi. Karena dengan menggunakan sistem konsignasi, tanpa modal Apotek Campang Raya dapat menjual barang-barang konsignasi tersebut. PT Ganta Usaha Tenggalan merupakan PT dengan menggunakan sistem konsignasi, transaksi dengan cara penjualan konsignasi ini mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan pembayaran secara langsung.

Pemilik dan Karyawan Apotek Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kelurahan Campang Raya dalam sehari-hari melakukan transaksi jual beli, seperti jual beli obat-obatan, jual beli alat-alat Kesehatan, dan lain-lain dari penjual kepada pembeli. Obat-obatan, alat-alat, serta barang-barang yang diperjual belikan tersebut sebagian merupakan barang-barang Konsignasi dari berbagai macam Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Lampung, salah satunya PT Ganta Usaha Tenggalan.

Permintaan barang-barang Konsignasi terjadi satu sampai dua kali dalam seminggu dalam beberapa surat pesanan dari Apotek Campang Raya dengan PT Ganta Usaha Tenggalan. Begitupun pemberian barang-barang

konsignasi yang terdapat di dalam beberapa faktur yang diberikan pihak PT Ganta Usaha Tenggalan selaku pengamanat dengan Apotek Campang Raya selaku komisioner.

Alasan-alasan bagi pemilik barang atau pengamanat (consignor) yang disini adalah PT Ganta Usaha Tenggalan, untuk mengadakan perjanjian konsignasi yaitu:

1. Konsignasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor, terutama apabila, Barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak tertentu dan belum terkenal. Penjualan pada masa-masa yang lalu dengan melalui dealer tidak menguntungkan. Harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi pihak dealer apabila ia harus membeli barang-barang yang bersangkutan.
2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan oleh pengamanat. Barang-barang konsignasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner.
3. Pengamanat ingin mendapatkan penjual khusus (specialist) dalam perdagangan barang-barangnya, terutama untuk dibidang kefarmasian dan lain-lain.
4. Harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat, demikian pula terhadap jumlah barang-barang yang siap dipasarkan dan stock barang-barang tersebut.

Alasan-alasan Apotek Campang Raya sebagai Komisioner menerima perjanjian konsignasi, antara lain :

- a. Komisioner dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi.
- b. Resiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan.
- c. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab adanya barang-barang konsignasi yang diterima atau dititipkan oleh pengamanat.

Sistem konsignasi yang dilakukan PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya adalah sistem kerjasama atau syirkah wujud yaitu perserikatan yang dimana sama-sama berkontribusi dan pihak ketiga memberikan kontribusi modal. Adapun cara-cara pemesanan barang konsignasi tersebut seperti halnya Apotek Campang Raya memesan barang-barang konsignasi kepada PT Ganta Usaha Tenggalan, sebagai berikut :

1. Tuliskan barang-barang konsignasi yang ingin dipesan di kertas atau buku difecta
2. Dari difecta lanjut ditulis ke surat pesanan dalam 2 rangkap, 1 untuk arsip Apotek yang 1 lagi untuk PBF, namun Surat Pesanan (SP) tersebut harus sudah ditanda tangani oleh Apoteker pengelola Apotek
3. Setelah itu barang akan segera datang dalam jangka waktu 6 jam atau kemungkinan esok nya barang akan diantar ke Apotek.
4. Ketika barang sudah datang, diharap penerima barang untuk diperiksa kembali barang konsignasi tersebut dengan tujuan tidak ada barang

yang cacat, dan sama seperti yang tertera di faktur baik jumlah dan harga.

Apotek Campang Raya mengalami kendala dalam penjualan konsignasi, diantaranya:

- a. Perjanjian yang sulit untuk mencapai kata mufakat.
- b. Sistem penginputan dan pencatatan yang belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- c. Mangkirnya pembayaran pada saat jatuh tempo.

Perjanjian-perjanjian awal dalam kerjasama mengenai barang-barang konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggala dengan Apotek Campang Raya, berawal dari pengenalan barang-barang konsignasi, negosiasi, hingga akhir sampai pada pembayaran, ada hal-hal mengenai kecurangan-kecurangan yang mulai-mulai timbul dalam kerjasama yang dilakukan dari kedua belah pihak. Sehingga perjanjian-perjanjian awal yang sudah dibuat sulit terealisasi untuk mencapai kata mufakat.

Dalam standar akuntansi keuangan penginputan barang-barang konsignasi melalui Otomatisasi sistem penjualan yaitu komputer yang berbasis akuntansi penjualan. Pada Apotek Campang Raya penginputan untuk barang-barang konsignasi belum dibuat sistemnya secara terperinci khusus untuk barang-barang konsignasi, namun barang-barang konsignasi di input dalam sistem pembelian biasa, sehingga tidak terpantau jelas seberapa barang yang terjual dan tersisa maupun pembayaran yang akan dikeluarkan nantinya. Pencatatan persediaan juga belum baik dan rapi,

sehingga perolehan laba bersih pemilik usaha tidak bisa diketahui dengan tepat.

Mangkir dalam pembayaran barang-barang konsignasi yang sudah jatuh tempo merupakan hal yang seringkali dilakukan oleh Apotek Campang Raya kepada PT Ganta Usaha Tenggalan. PT Ganta Usaha Tenggalan dirugikan akan ketelatan tersebut, karena uang pembayaran barang tersebut akan digunakan pemilik barang untuk memutar modalnya lagi. Tidak hanya satu sampai tiga faktur dalam ketelatan pembayaran namun terkadang hampir lebih dari empat faktur telat untuk membayar dan itu semua sudah jatuh masa temponya.

Praktek keagenan konsignasi yang berjalan antara PT Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya dalam aspek rukun dalam konsignasi telah terpenuhi namun daripada itu praktek yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena masih ada beberapa kekurangan dari aspek lain yang mendorong tidak sempurnanya sebuah akad, hal tersebut antara lain:

1. Tidak adanya batasan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dijalankan oleh para agen. PT Ganta Usaha Tenggalan tidak menentukan harga jual produk sedangkan dia mempunyai hak mutlak dapat dilihat dari hak kepemilikan barang tersebut, sehingga terjadi perbedaan harga jual obat dari PT Ganta Usaha Tenggalan memang lebih mahal dari PBF-PBF lainnya, dikarenakan PT Ganta Usaha Tenggalan merupakan PBF yang terlengkap di Bandar Lampung. Karena ketidakstabilan harga sehingga

mengakibatkan ketidakpercayaan konsumen terhadap Apotek Campang Raya. Ini salah satu faktor yang sangat merugikan Apotek Campang Raya, hanya karena tidak diberikan harga jual dari PT Ganta terkadang Apotek Campang Raya membuat perhitungan sendiri untuk menentukan harga jual produk.

Padahal apabila PT Ganta menetapkan harga jual produk, mungkin kesenjangan jual beli antara apotek satu dengan apotek lain tidaklah terdapat perbedaan yang begitu berbeda, Dengan beberapa indikasi tersebut akhirnya terjadi perbedaan harga jual barang konsignasi di pasar dan menimbulkan adanya ketidakharmonisan yang timbul dari para apotek sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, apalagi pada apotek-apotek kecil.

2. Apotek Campang Raya sebagai penerima barang membiayai operasional sendiri. Seperti plastik, kertas rol prin, kertas surat pesanan dan lain-lain, yang seharusnya pada sistem konsignasi semua pembiayaan operasional ditanggung oleh pemilik barang.
3. Komisi yang dijanjikan PT Ganta Usaha Tenggala kepada Apotek Campang Raya merupakan kewajiban pemilik barang untuk memberikan komisi apabila memenuhi target penjualan, seperti telah disepakati dalam akad, namun tidak terrealisasikan.
4. Amanat yang diberikan oleh PT Ganta Usaha Tenggala selaku pemilik barang kepada Apotek Campang Raya disalahartikan dengan penggunaan hasil penjualan.

Wawancara dengan pihak PT. Ganta Usaha Teggalan, yaitu dengan Mas Agung dan Mas Rudi, selaku penyalur barang ke Apotek Campang Raya dan juga sebagai penagih hutang piutang yang dibebankan Apotek Campang Raya, adapun masalah lain yang didapatkan berupa uang hasil penjualan yang ada di Apotek Campang Raya. Apotek menggunakan hasil penjualan dari barang konsignasi tersebut untuk kepentingan pribadi, hingga terlambat bahkan mangkir dari pemenuhan kewajiban kepada PT. Ganta Usaha Teggalan. Padahal di perjanjian awal atau akad yang telah berjalan dari awal yaitu jatuh tempo hanya sampai 30 hari, itu pun sudah diberi toleransi yaitu perpanjangan waktu, karena dari PBF lainnya ada beberapa yang hanya memberikan jatuh tempo 21 hari.

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak dalam persoalan ini harus dibangun untuk mencegah terjadinya kecurangan, kebohongan dan penipuan. Para penerima barang biasanya menggunakan uang barang konsignasi itu untuk keperluan pribadinya, sehingga pemilik Apotek tersebut susah untuk membayar hutang dari barang konsignasi yang sudah terjual yang padahal sudah jatuh tempo untuk membayarnya, bahkan itu terjadi sudah keseringan kali.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Keagenan Konsignasi

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yang disebut dengan fiqh

muamalah. Yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Quran dan Hadits.

Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli, dimana terjadinya suatu perjanjian tukar menukar benda, atau barang yang mempunyai nilai, terjadi sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu membeli atau membayar untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara'. Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur yang telah disepakati oleh syara' bila tidak maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Namun didalam kerjasama atau perkongsian atau syirkah. Syirkah yaitu campur atau percampuran dan Persekutuan

Yang paling ditekankan dalam syirkah yaitu asas kejujuran karena hal ini berhubungan dengan bisnis suatu kerjasama dalam usaha tertentu, hal ini juga telah dicontohkan oleh nabi dengan hadistnya :

Allah SWT Berfirman dalam surah Al-Maaidah ayat 2

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 198

Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 7

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 12

Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti cara riba dan

judi serta cara cara lainnya dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum islam yang jelas memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti. Dan segala sesuatu yang belum ada ketentuan tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan dengan hukum syara'.

Berdasarkan praktek Konsignasi yang terjadi antara Apotek Campang Raya Bandar Lampung dengan PT. Ganta Usaha Tenggalan, dalam hal ditahannya pemberian komisi, tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena pada dasarnya komisioner sebagai penjual barang berhak atas komisi tersebut seperti telah disepakati pada awal perjanjian. Dan juga tidak diperbolehkannya memakai uang barang konsignasi tanpa sepengetahuan yang mempunyai barang konsignasi, bahkan seringnya mangkir dalam bayaran yang sudah jatuh tempo yang dimana sudah ada dalam perjanjian awal pada saat melakukan akad kerjasama, itu tidaklah dibenarkan dalam Islam, karena dalam praktek Keagenan konsignasi ini antara Apotek Campang Raya dan PT Ganta Usaha Tenggalan tidak menggunakan kejujuran dalam melakukan kerjasama. Banyak hal-hal yang menyimpang dari akad-akad kerjasama sebelumnya, sehingga bisa menumbuhkan unsur penipuan dan kecurangan-kecurangan. Apabila dalam melakukan kerjasama tersebut tidak ada unsur penipuan dan

mengikuti hukum Islam atau tidak bertentangan dengan syara' maka kerjasama tersebut boleh dilakukan. Karena ada unsur kemaslahatan dan kejelasan antara pihak yang satu dengan yang lain.

Adapun Hadits dan Kaidah Fiqh yang sesuai yaitu:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك وابن ماجه)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda “Tidak boleh memberikan mudharat dan tidak boleh membalas mudharat dengan kemudharatan” (HR. Malik dan Ibnu Maajah)

Pejelasanannya : Bahwa mudharat itu wajib menghilangkannya, dan manusia untuk menghilangkan kemudharatan dari dirinya dan orang lain, dan tidak boleh menghilangkan sesuatu yang terlarang dengan terlarang juga, karena itu ada kedhaliman, dan kedhaliman itu haram.

Berdasarkan hadits di atas, maka untuk kemudharatan yang timbul dalam sistem keagenan konsignasi di antara dua belah pihak yaitu dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada, sistem konsignasi dalam praktik tidak dilandaskan sistem keadilan dan prinsip kemitraan dalam akad syirkah tidak terealisasi dengan baik, sehingga kerjasama seperti ini sangat tidak diperbolehkan. Padahal dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, telah memberikan pedoman mengenai sifat kemudharatan yang harus dihindari dan dihilangkan. Apalagi jika kemudharatan tersebut mengancam nyawa, harta, kehormatan dan darah seorang muslim.

Tidak Boleh Melakukan Kemudharatan (Kerusakan) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain, disini yang dilarang adalah menyakiti bukan karena alasan syar'i. Sedangkan menyakiti orang lain dengan ketentuan syari'i, seperti menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat dhalim atau melakukan kejahatan, maka hal itu diperbolehkan. Karena hukuman yang diberikan adalah ketentuan syariat, dan bahkan syariat menyatakan bahwa hukuman tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.

Allah tidak memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang membawa mudharat, atau untuk meninggalkan sesuatu yang membawa manfaat. Semua yang diperintahkan Allah kepada manusia pada dasarnya untuk kebaikan di dunia dan akhirat. sedangkan yang dilarang pada dasarnya perkara-perkara itu membawa kerusakan bagi dunia dan akhirat. Allah berfirman: "Katakanlah: 'Rabbku menyuruh menjalankan keadilan.'" (al-A'raaf: 29) "Katakanlah: 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi.'" (Al-A'raaf: 33). Dan tidak diragukan lagi bahkan keadilan pasti membawa manfaat. Sedangkan perbuatan keji pasti membawa kerusakan. Karenanya semua orang yang masih bisa menggunakan akal sehatnya, ketika mengamati hukum-hukum Allah, jelas akan mengetahui bahwa Allah membolehkan kepada hamba-Nya segala sesuatu yang bisa menjaga keselamatan akal dan badannya, dan Allah tidak melarang kecuali perkara-perkara yang dapat merusak otak dan badannya.

Yang termasuk bentuk tidak adanya kemudharatan dalam Islam adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang merasa berat, atau mendapatkan kesulitan. Dan inilah karakter Islam, agama yang memberikan kemudahan. Seperti halnya sistem konsignasi dalam penjualan, untuk memasarkan produk agar dapat dijangkau oleh pembeli, penjual dapat pula menempuh suatu cara penjualan yang lain yaitu penjualan konsignasi. Karena dengan adanya sistem konsignasi ini dua belah pihak atau lebih dapat saling mempermudah dalam membangun kerjasama dalam jual beli. Dengan tanpa modal penerima barang (komisioner) dapat menjualkan barang-barang konsignasi tersebut, komisioner tidak dibebani resiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang-barang konsignasi dan pengamanatpun diuntungkan, dengan sistem konsignasi ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memperluas daerah pemasaran.

Kaidah: “Kemudharatan itu harus dihapuskan.” Kaidah ini bersumber dari hadits Rasulullah SAW. Maksudnya, menghilangkan kemudharatan yang telah terjadi adalah suatu kewajiban, juga diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Seperti sistem keagenan konsignasi ini ketika melakukan kerjasama, dan di dalam kerjasama tersebut merugikan salah satu pihak dan pihak lainnya, maka wajib untuk menghilangkan kerugian yang dibuatnya tersebut, dan juga mengganti atau memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kerugian dan kecurangan yang diperbuatnya.

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas kemudharatan.” Adapun permasalahan yang ditemukan dalam sistem keagenan konsignasi antara PT. Ganta Usaha Tenggalan dengan Apotek Campang Raya. Yaitu ketika Apotek Campang Raya mangkir dalam pembayaran dari barang-barang konsignasi yang sudah laku terjual serta telah jatuh tempo, dan seringnya memakai uang penjualan barang-barang konsignasi tersebut untuk keperluan pribadinya, yang dimana seharusnya uang hasil penjualan tersebut seharusnya diberikan terdahulu kepada pemilik barang, ketika komisioner membutuhkan uang tersebut bisa dimusyawarahkan kepada pemilik barang, namun hal tersebut tidak dilakukan karena hal tersebutlah pemutaran modal pemilik barang bisa terhambat. Dengan adanya hal tersebut membuat pihak pemilik barang (pengamanat) yaitu PT Ganta Usaha Tenggalan, melakukan hal sesuatu yang merugikan pula kepada Apotek Campang Raya, dengan tidak mengganti biaya operasional yang telah dikeluarkan pihak Apotek karena jika ditinjau dari ketidakberpindahan kepemilikan barang, maka seharusnya biaya operasional ditanggung oleh pemilik barang. Tidak hanya itu saja PT. Gantajuga tidak memenuhi janjinya dalam pemberian *fee* apabila penjual barang memenuhi target penjualan, seperti yang telah disepakati dalam akad, karena tindakan yang saling memudharatkan ini tidaklah mendatangkan manfaat. Justru memperluas kemudharatan.

Kemudharatan harus dicegah sebelum terjadi. Karena mencegah sesuatu lebih ringan dan lebih mudah daripada menghapus kemudharatan

yang sudah terjadi. Bagaimanapun, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Namun demikian, usaha untuk mencegah terjadinya mudharat ini tentunya dilakukan semampunya. Sebagai pelaksanaan kaidah ini adalah dibolehkannya menahan orang yang jelas diketahui sebagai sumber kerusakan, hingga taubat. Hal ini perlu dilakukan, agar tidak menebarkan mudharat di tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di kemukakan dalam bab-bab terdahulu dan setelah mengadakan penelitian pada tinjauan hukum Islam tentang praktek keagenan konsignasi antara PT Ganta Usaha Tenggala dengan Apotek Campang Raya, dari penelusuran yang dilakukan, wawancara yang berjalan dan penelitian yang dalam maka dapat memberikan beberapa kesimpulan penelitian ini serta saran-saran yang mungkin bisa menjadi masukan yang berarti bagi masyarakat dan usaha makro maupun mikro lainnya, Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem keagenan konsignasi yang dipraktikan antara PT Ganta Usaha Tenggala dengan Apotek Campang Raya merupakan bentuk Syirkah Wujuh (al-ta'awun), merupakan satu bentuk perkongsian atau perserikatan tanpa modal yang berlandaskan tolong menolong. Dalam sistem syirkah atau kerjasama dalam konsignasi yang dipaktikan awalnya berjalan dengan baik, namun ada faktor-faktor lain yang muncul, dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan kerjasama salah satunya seperti kewajiban penerima barang konsignasi yang selalu saja mangkir dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan hasil penjualan barang konsignasi terhadap ke pemilik barang, sehingga akad awal tidak terrelisasikan pada waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan, sehingga kerjasama yang berjalan tidak menjadi begitu lancar dan hal itu tidak adil bagi pihak PT Ganta Usaha Tenggala sebagai pemilik barang konsignasi. Karena hal

kerjasama seperti itu apabila dilakukan terus menerus dapat merugikan salah satu pihak dan pihak-pihak lainnya yang terkait, yang padahal kalau di lihat dari akad syirkah, bahwa dalam sebuah kerjasama itu harusnya berkeadilan dan saling menguntungkan. Namun pada kenyataannya akad syirkah yang di janjikan tidak dipenuhi seperti akad awal, maka menimbulkan kerugian salah satu pihak, sehingga akad yang di lakukan tidak terealisasi dan tidak berjalan dengan baik

2. Mengenai kerjasama praktek konsignasi yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Adanya penggunaan uang hasil penjualan oleh komisioner untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik barang tidak bisa dibenarkan menurut Islam, karena melanggar ketentuan dengan syara'. Hasil penjualan merupakan hak dari pemilik barang dan harus dikembalikan terlebih dahulu kepadanya dan apabila komisioner membutuhkan bantuan bisa mengutarakan kebutuhannya kepada pemilik barang sehingga kebutuhan produksi dapat dipenuhi terlebih dahulu demi keberlangsungan usaha yang akan dijalankan.

Pemberian komisi atas jasa komisioner yang telah memasarkan hasil produksi ke area penjualannya dapat dibenarkan dan bahkan diwajibkan atas dasar bahwa pemberian komisi ini layak untuk menjadi pengganti atas resiko, tenaga, dan usaha yang dilakukan oleh komisioner pada penjualan barang dalam jumlah tertentu. Karena dalam melakukan kerjasama harus terdapat unsur kerelaan, kejujuran, dan dapat dipercaya. Tidak boleh melakukan kerjasama dengan unsur bathil dan kebohongan yang dilakukan

oleh kedua belah pihak karena Allah tidak menyukai hal-hal seperti itu, bahwasanya manusia dibebankan untuk menghilangkan kemudharatan dari dirinya dan orang lain, juga tidak boleh sesuatu yang mudharat dibalas dengan kemudharatan pula, karena itu ada kedhaliman, dan kedhaliman itu haram.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, memberikan saran-saran yang diharapkan serta akan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang melakukan kerjasama dan Apotek Campang Raya (komisioner) dengan PT Ganta Usaha Tenggalan (pengamanat) yang melakukan kerjasama keagenan konsignasi, Adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Adanya toleransi secara terbuka bahwa tiap komisioner berhak untuk meminjam uang dari pemilik barang dalam jumlah tertentu setelah pembayaran semua hasil penjualan.
2. Menaikkan dan melanggengkan nilai pendapatan komisioner dari komisi penjualan untuk meningkatkan semangat para komisioner, dan mengurangi penggunaan uang hasil penjualan seperti yang sudah berlangsung sebelumnya.

Dalam melakukan kerjasama Keagenan Konsignasi antara Apotek Campang Raya (komisioner) dengan PT Ganta Usaha Tenggalan (pengamanat) untuk lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam syara' atau hukum Islam dalam melakukan kerjasama agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan

kedua belah pihak, dan tidak akan terjadi kecurangan dalam kerjasama jika memahami dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Tanpa tempat: Ictisar baru Van Hoeve, 1996.
- Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz, Syekh Shalih. et. al. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ahmad Idris. *Fiqhal-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Ahmad Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- , *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Alaudin, Al-Kasyani. *Bada'i Ash-Shana'i fi TambSyar'i*, Syirkah Al-Mathbu'ah, Mesir.
- Ibn Rusyd Al-Hafizh. *Bidayah Al-Mujtahidwa An-Nihayah Al-Muqtashid*, Beirut: DarAl-Fikr.
- Al-Mushlih Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Jaziri Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam, t.t
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin, Zainal Askin. *Pengatur Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arief Sritua. *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia; Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Wacana Mulia, 1998.
- Arifin. *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*, Ed. Revisi Ke-3, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Ash-Shiddieqy Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Mansurah: Darul Wafa', Juz IV, 2001.

BahasaPusat.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed-4. Jakarta: PT GramediaPusatUtama, 2008.

Daud Muhammad.*Hukum Islam*, Surakarta: Gramedia, 2001.

Departemen Agama RI.*Al-Quran dan Terjemahannya*, Penerbit: Al-Hidayah, Surabaya, 1998.

-----, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Penerbit: Diponegoro Bandung, 2005.

Dewi Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni salma barlinti.*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

DjianWidijowati.*Hukum Dagang*, Ed. 1, Yogyakarta: ANDI, 2010.

Febriani

Reni.*Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek*, Notaris Nomor : 151-XVII-2006.

GhufronIhsan.*Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Gontor Darussalam Modern.*Ushul Fiqh Wal Qowaidah Fiqhiyah*, Ponorogo: Darussalam Pers, 2006.

HendiSuhendi.*Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

IbnuHajar Al-Asqalani Al-Hafizh.*Bulughul Maram*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

I Doi Abdurrahman.*Shari'ah : The Islamic Law*, A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur, 1990

Indriyo, Gitosudarmo.*Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Iqbal Zamir, AbbasMirakhor.*Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2008.

Ismail, Muhammad Syah.*Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Ismail, Muhammad.*Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Ja'farKumedi.*Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Jusmailani.*Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

K. Banten. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

- K, Lubis Suhrawardi, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mahmudah Siti. *Historisitas Syari'ah kritik relasi-kuasa Khalil 'Abd al-Karim*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- , *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Ed 1-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moloeng J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nejatullah Muhammad. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Buki Aksara, 1996.
- Qardhawi Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- R. Drebin Allan. *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*, ahli bahasa oleh Freddy Sarangih, et. al, Cet. Ke-1, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Rival. *Keagenan dan Distribusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Roni Hanjito Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Sahrani Sohari, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saifuddin Anwar. *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Sugiono. *Metode Deskriptif Analitis*, Jakarta: 2009.
- Suwarma. *EYD Pedoman berbahasa Indonesia untuk warga Negara*, Jakarta: LIMAS, 2014.

Syafe'IRachmat.*FiqhMuamalah*, Bandung: PustakaSetia, 2000.

TarmiziErwandi.*Harta Haram MuamalatKontemporer*, Bogor: P.T. BerkatMuliaInsani, 2016.

Wagianto.*ImplementasiFungsiLembagaArbitraseSyariahDalamPenyelesaianSengketaPerbankan Di Pengadilan Agama Kelas 1 ATanjungKarang*, Bandar Lampung: LP2M IAIN RadenIntan Lampung, 2015.